



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jambu Karang No.8 Telepon (0281) 891450 Fax.(0281)895194
PURBALINGGA - 53311

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya sejak tahun 2015 semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran sebelumnya dalam satu periode.

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan;
- e. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purbalingga tahun 2015 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 113 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;



- t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat penjelasan mengenai entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan mengenai komponen pendapatan, belanja, neraca.

Bab VI Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD



2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional khususnya di bidang ekonomi dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian setiap tahun, manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, nilai PDRB yang besar



menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ketahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan.



Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar ?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*); Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

2.2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah beralih dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga, Walaupun demikian



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

kategori pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2015 peranannya masih bertengger di kisaran 30 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh kategori C, industri pengolahan yang berada pada kisaran 26 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, pengadaan listrik dan gas hingga 2015 hanya memberikan peran sebesar 0,04 persen.

Tabel. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011 (1)	2012 (2)	2013* (3)	2014* (4)	2015 ** (5)
A	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	30,80	29,64	29,83	29,74	29,80
B	Pertambangan dan Penggalian	4,70	4,66	4,63	4,86	5,09
C	Industri Pengolahan	24,16	24,97	24,81	25,52	25,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
F	Konstruksi	5,68	5,79	5,72	5,56	5,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	14,12	13,44	13,27	12,60	12,31
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	2,97	2,98	3,03	3,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,26	2,21	2,23	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,72	1,64	1,58	1,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	2,28	2,25	2,15	2,11
L	Real Estat	1,06	1,02	1,04	1,03	1,03
M	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16
N	Administrasi Pemerintahan	3,05	3,07	2,98	2,82	2,78
O	Jasa Pendidikan	4,18	5,18	5,57	5,64	5,51
P	Jasa Kegiatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,93	0,97	0,98	0,99
Q	Jasa lainnya	1,86	1,74	1,78	1,82	1,75
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015 mencapai 5,39 persen, tidak selalu dibanding tahun 2014 dengan pertumbuhan 5,86 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,95 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan satu-satinya usaha yang mengalami kontraksi pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 3,84 persen.

Tabel

Laju Pertumbuhan Ril PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2012-2015

	Lapangan Usaha	2012 (1)	2013 * (2)	2014 * (3)	2015 ** (4)
A	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan		2,19	2,54	5,54
B	Pertambangan dan Penggalian		8,17	6,02	6,72



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

C	Industri Pengolahan	8,27	7,46	8,02	5,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,89	8,26	3,61	3,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-3,32	0,25	3,44	1,46
F	Konstruksi	7,94	4,86	4,41	8,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda	2,36	4,89	4,73	4,19
H	Motor	7,29	8,94	8,46	8,83
I	Transportasi dan Pergudangan	6,40	4,19	7,59	7,98
J	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,55	5,98	11,48	9,95
K	Informasi dan Komunikasi	3,42	2,98	3,68	4,33
L	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	9,59	6,21	7,14
M	Real Estat	10,66	12,88	7,60	9,71
N	Jasa Perusahaan	0,48	2,29	0,75	5,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	24,71	9,36	9,98	6,15
P	wajib	12,25	8,59	9,50	7,27
R	Jasa Pendidikan	1,78	9,23	8,53	3,23
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				
	Jasa lainnya				
Produk Domestik Regional Bruto		5,67	5,79	5,86	5,39

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2012-2015

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,71 persen, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 8,83 persen penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 7,98 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 7,27 persen, real estat tumbuh 7,14 persen konstruksi tumbuh 6,01 persen, jasa pendidikan tumbuh 6,15 persen. Sedangkan kegiatan lainnya tumbuh kurang dari 6 persen.

2.4. PDRB Perkapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.4 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Rp) 2010-2015

PDRB / Kapita	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pertahun	Perbulan	Pertahun	Perbulan
2010	12.763.238,55	1.063.603,21	12.763.238,55	1.063.603,21
2011	14.182.449,02	1.181.870,75	13.332.877,71	1.111.073,14
2012	12.453.320,80	1.287.776,73	13.947.811,20	1.162.317,60
2013	16.810.582,97	1.400.881,91	14.522.788,60	1.210.232,38
2014	18.843.658,82	1.570.304,91	15.212.239,82	1.267.686,65
2015	20.663.951,83	1.721.995,99	15.867.613,16	1.322.301,10

Pada tahun 2015 PDRB per kapita Purbalingga mencapai Rp 20.663.951,83 atau sebesar Rp 1.721.995,99 dalam satu bulan dengan pertumbuhan sebesar 9,66 persen. PDRB perkapita tahun 2011 tumbuh hanya sekitar kurang dari 9 persen. Tahun 2014 mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 12,09 persen.

Diperhitungkan dengan harga konstan pada tahun 2010 pertumbuhan pendapatan perkapita tumbuh pada kisaran 4 hingga 5 persen setiap tahunnya, hal ini berarti pada kenyatannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan



adanya perubahan harga (inflasi) rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 10 persen.

2.5 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Purbalingga menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi sebkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Inmdonesia (KBLUI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha sebagaimana uraian di bawah ini.

2.5.1 Pertanian, kehutanan dan perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi kontribusi terbesar pada PDRB atas dasar harga berlaku yaitu masih dalam kisaran 30an persen. Masih didominasi oleh sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dan perburuan yang memberikan andil sampai dengan lebih dari 90 persen, paling besar memberikan sumbangan adalah dari sub-sub kategori tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, yaitu dalam kisaran 32 persen. Komoditas tanaman hortikultura tahunan penyumbang penyumbang terbesar adalah pisang, duku, pepaya dan jeruk. Seperti kita ketahui bahwa hampir disetiap jengkal pekarangan penduduk di wilayah Purbalingga pasti minimal ada satu rumpun tanaman pisang sehingga produksinya cukup tinggi. Komoditas tanaman lainnya yang menyumbang andil terbesar kedua adalah tanaman duku. Duku Purbalingga adalah buah andalan yang banyak tumbuh dan berproduksi di kecamatan-kecamatan Kaligondang, Pengadegan, Padamara, Kejobong dan beberapa kecamatan lainnya. Penyumbang terbesar kedua adalah dari sub-sub kategori tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai yang mencapai 25,6 persen. Produksi padi terbesar berada di kecamatan Bukateja dan Kemangkon. Sub-sub kategori peternakan juga memberikan andil cukup tinggi, yaitu sebesar 21,4 persen, hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa tempat andalan peternakan seperti di Kutasari, Bojongsari dan Mrebet untuk peternakan sapi dan kerbau (Hasil Sensus Pertanian 2003).



Laju pertumbuhan pada kategori pertanian kehutanan dan perikanan mencapai 5,01 persen. Lebih tinggi laju pertumbuhannya dari tahun sebelumnya yang melaju dengan 3,54 persen. Hal tersebut lebih didukung oleh pertumbuhan sub kategori pertanian, peternakan dan jasa pertanian yang melaju hingga 5,20 persen. Tanaman pangan adalah sub-sub kategori yang menjadi pemicunya, karena pada tahun sebelumnya hanya melaju tumbuh sebesar 0,36 persen pada 2015 ini melejit dengan kecepatan 10,03 persen. Iklim dan penambahan luas tanam menjadikan produksi padi, jagung dan kedelai mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.5.1 Peranan Kategori Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Lapangan Usaha (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014*	2015 **
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	92,2	92,1	92,0	92,1	92,1
	- Tanaman Pangan	24,5	27,8	26,5	24,3	25,6
	- Tanaman Hortikultura	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9
	- Tanaman Perkebunan	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	- Peternakan	33,6	28,7	29,8	32,1	32,1
	- Jasa Pertanian dan Perkebunan	17,1	17,2	16,6	17,4	16,6
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	20,6	21,6	22,4	21,8	21,4
3	Perikanan	1,9	2,2	2,2	2,0	1,9
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.5.2 Pertambangan dan Penggalian

Satu-satunya kategori yang ada produksinya di Kabupaten Purbalingga pada kategori pertambangan dan penggalian adalah pertambangan dan penggalian lainnya. Dalam sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya meliputi penggalian pasir, batu kali dan tanah liat. Produksi penggalian batu dan pasir sungai di Purbalingga pada tahun 2015 meningkat cukup banyak, sehingga peranannya terhadap PDRB total mengalami peningkatan 1,2 poin dari tahun sebelumnya yaitu 4,9 menjadi 5,1 persen. Kategori pertambangan dan penggalian pada tahun 2015 menunjukkan laju pertumbuhan positif sebesar 2,40 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 6,72 persen. Penurunan ini dikarenakan ada instruksi Bupati Nomor : 540/190 tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 terkait pelarangan pemakaian backhoe atau alat berat sejenisnya untuk penambangan galian.

2.5.3 Industri Pengolahan

Pada kategori industri pengolahan secara keseluruhan memberikan andil sebesar 25,70 persen terhadap PDRB, sedangkan lapangan usaha yang



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

menyumbang peranan terbesar terhadap katagori industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 53,40 persen pada tahun 2015.

Peranan terbesar berikutnya industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 15,20 persen diikuti oleh industri penolahan tembakau 9,50 persen, industri kayu memberikan andil sebesar 8,60 persen, sama seperti industri pengolahan lainnya. Industri pengolahan lainnya meliputi sub kategori industri pengolahan yang tidak tergolong dalam 15 sub kategori lainnya, termasuk industri pengolahan bulu mata dan rambut palsu. Industri selebihnya memberikan sumbangan kurang dari 2 persen.

Tabel 2.5.3 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha (1)	2011	2012	2013*	2014*	2015 **
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri batu bara dan pengilangan migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri makanan dan minuman	51,20	50,60	50,50	51,00	53,40
3	Industri pengolahan tembakau	10,20	10,50	10,60	10,60	9,50
4	Industri tekstil dan pakaian jadi	2,10	2,20	2,30	2,10	1,90
5	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Industri kayu, barang dari kayu, gabus, barang anyaman dari bambu, rotan	9,40	8,60	8,90	8,80	8,60
7	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
8	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	13,70	15,50	15,50	15,80	15,20
9	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Industri barang galian bukan logam	0,80	0,90	0,90	0,80	0,80
11	Industri logam dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0,40	0,50	0,50	0,50	0,40
13	Industri mesin dan perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Industri alat angkutan	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40
15	Industri Furnitur	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	10,40	9,90	9,30	9,00	8,60
Industri Pengolahan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara keseluruhan laju pertumbuhan kategori industri pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 5,82 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 9,41 persen, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekam tahun 2015 melaju hingga sebesar 9,02 persen. Pertumbuhan sub kategori industri pengolahan yang di bawah satu persen terjadi pada industri pengolahan karet dan pengolahan barang galian bukan logam, industri knalpot yang termasuk dalam sub kategori industri pengolahan barang dari logam, juga pertumbuhannya kurang dari satu persen, sementara pertumbuhan sub kategori industri pengolahan lainnya hanya sekitar 2,30 persen.



2.5.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 0,04 persen terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 dari kontribusi tersebut sebanyak 98,82 persennya disumbangkan oleh lapangan usaha ketenagalistrikan dan 1,18 persen oleh pengadaan gas dan produksi es. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami kontraksi 3,84 persen setelah pada tahun 2014 tumbuh hingga 3,61 persen. Kontraksi tersebut lebih disebabkan oleh lapangan usaha ketenaga listrikan yang kontraksi 3,92 persen sedangkan pada pengadaan gas dan produksi es tumbuh hingga 6,80 persen setelah tahun sebelumnya juga tumbuh sekitar 5,68 persen.

Tabel 2.5.4 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDBR Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013* (4)	2014* (5)	2015 ** (6)
1	Ketenaga Listrikan	99,18	99,13	98,98	98,89	98,82
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,82	0,87	1,02	1,11	1,18

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.5.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2011-2015 mengalami pengurangan terus menerus secara berturut-turut 0,14 persen, 0,13 persen, 0,12 persen, 0,11 persen dan 0,10 persen tergeser oleh kategori lainnya yang memberikan sumbangan semakin besar dari tahun ke tahun. Sementara pertumbuhannya masih melaju sebesar 1,46 persen tidak selaju pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,44 persen.

2.5.6 Konstruksi

Peranan kategori konstruksi cenderung stagnan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dalam kisaran 5,68 persen hingga 5,80 persen. Maraknya perbaikan dan betonisasi jalan raya di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga perbaikan dan rehab beberapa jembatan serta rehab jaringan irigasi sawah dalam rangka upaya program khusus (UPSUS) dalam rangka peningkatan



produksi padi, jagung dan kedelai. Di samping itu juga pembangunan gedung kantor maupun sekolah beberapa tahun belakangan ini menjadikan kategori konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, pada tahun 2015 laju pertumbuhan kategori konstruksi mencapai 6,01.

Tabel 2.5.6
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDBR Kategori Konstruksi (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha Konstruksi	2011 (1)	2012 (2)	2013* (3)	2014* (4)	2015 ** (5)
1	Pertumbuhan Ekonomi		0,79	7,94	4,86	4,41
2	Peranan Ekonomi	5,68		5,79	5,72	5,68

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

“* Angka sementara

“** Angka sangat sementara

2.5.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir peranan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sumbangannya terhadap perekonomian juga mengalami penurunan dari 14,12 persen pada tahun 2011 hingga 12,31 persen pada tahun 2015, namun kategori ini masih tumbuh besar 4,19 persen setelah pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 4,73 persen.

Tabel 2.5.7 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDBR Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011 (1)	2012 (2)	2013* (3)	2014* (4)	2015 ** (5)
1	Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya		25,30	28,04	29,68	29,49
2	Perdagangan besar, eceran bukan mobil dan sepeda motor	74,70		71,96	70,32	70,51

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

“* Angka sementara

“** Angka sangat sementara

2.5.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Lapangan usaha angkutan darat memberikan kontribusi besar selama 5 tahun terakhir dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 97,95 persen pada tahun 2015, sedangkan pergudangan dan angkutan sungai masing-masing menyumbang sebesar 1,99 persen dan 0,06 persen. Pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan pada tahun 2015 sebesar 8,83 persen yang



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

didominasi pertumbuhan dari lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan sebesar 12,38 persen.

Pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan pada tahun 2015 sebesar 8,83 persen yang didominasi pertumbuhan dari lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan sebesar 12,38 persen. Pada sub kategori angkutan sungai, danau dan penyeberangan pertumbuhannya paling lambat yaitu sebesar 4,88 persen.

Tabel 2.5.8 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDBR Kategori Transportasi dan Pergudangan (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011 (1)	2012 (2)	2013* (3)	2014* (4)	2015 ** (5)
1	Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Angkutan Darat	98,20	98,05	97,99	98,01	97,95
3	Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
5	Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir	1,73	1,88	1,94	1,93	1,99

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

2.5.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum

Pada tahun 2015 kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga sebesar 2,28 persen, lapangan usaha penyediaan makan dan minum berkontribusi sebesar 97,44 persen selebihnya dari lapangan usaha penyediaan akomodasi.

Secara keseluruhan kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,98 persen pada tahun 2015 dan laju pertumbuhan tahun ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 4,42 persen, masing-masing lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2015 sebesar 4,00 persen dan 8,07 persen.

Tabel 2.5.9 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDBR Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan minum (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011 (1)	2012 (2)	2013* (3)	2014* (4)	2015 ** (5)
1	Penyediaan akomodasi	2,10	2,51	2,76	2,74	2,56
2	Penyediaan makan minum	97,90	97,49	97,24	97,26	97,44

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara



2.5.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi peranan kategori informasi dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah terutama jasa telekomunikasi, peranan kategori informasi dan komunikasi terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2011-2015 sebesar 1,64 persen, 1,72 persen, 1,64 persen, 1,58 persen dan 1,56 persen. Laju pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi selalu di atas pertumbuhan ekonomi total. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 17,55 persen dan paling lambat pada tahun 2013 sebesar 5,98 persen. Tahun 2015 melaju dengan percepatan 9,95 persen.

2.5.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Peranan kategori jasa keuangan dan asuransi terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran dua persen setiap tahunnya. Penyumbang peranan terbesar dari lapangan usaha jasa perantara keuangan berkisar antara 75 hingga 90 persen dengan kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun. Sementara meskipun sumbangannya paling kecil, lapangan usaha asuransi dan dana pensiun menunjukkan peningkatan berturut-turut selama tahun 2011 hingga 2015 sebesar 0,83 persen, 0,96 persen, 1,03 persen, 1,11 persen dan 1,26 persen.

Tabel 2.5.11 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013* (4)	2014* (5)	2015 ** (6)
1	Jasa Perantara Keuangan	80,95	80,09	79,80	78,89	76,77
2	Asuransi dan dana Pensiun	0,83	0,96	1,03	1,11	1,26
3	Jasa Keuangan Lainnya	18,22	18,94	19,17	20,00	21,97
4	Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

2.5.12 Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Purbalingga dalam kisaran satu persen dengan tren yang semakin berkurang, berturut-turut sumbangannya kategori real estat selama tahun 2011-2015 sebesar 1,06 persen, 1,02 persen, 1,04 persen, 1,03 persen dan 1,03 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini cukup stabil dengan pertumbuhan selalu di atas empat persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2011-2015 adalah 4,93 persen, 6,13 persen, 9,59 persen, 6,21 persen dan 7,14 persen.



Tabel 2.5.12 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDBR Kategori Real Estat (persen) 2011-2015

	Lapangan Usaha Konstruksi (1)	2011	2012	2013*	2014*	2015 **
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,93	6,13	9,59	6,21	7,14
2	Peranan Ekonomi	1,06	1,02	1,04	1,03	1,03

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.5.13 Jasa Perusahaan

Selama lima tahun terakhir kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan ada kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 sebesar 0,14 persen, 2012 sebesar 0,15 persen, tahun 2013 hingga 2015 sebesar 0,16 persen hal ini menunjukkan pula peranan kategori jasa perusahaan ini relatif kecil dibanding peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Purbalingga. Laju pertumbuhan pada tahun 2011 hingga 2013 selalu di atas 10 persen, kemudian mengalami pelambatan dengan laju 7,60 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat dengan laju pertumbuhan 9,71 persen.

2.5.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2011-2015 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 3,05 persen, 3,07 persen, 2,98 persen dan 2,78 persen. Periode 2011-2015 laju pertumbuhan dari kategori ini selalu positif berfluktuatif, secara berturut-turut 1,71 persen, 0,48 persen, 2,29 persen, 0,75 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,04 persen.

Tabel 2.5.14 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDBR Kategori Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Purbalingga

	Lapangan Usaha Konstruksi (1)	(persen) 2011-2015				
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	1,71	0,48	2,29	0,75	5,04
2	Peranan Ekonomi	3,05	3,07	2,98	2,82	2,78

Sumber : PDRB Kab. Purbalingga 2011-2015

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



2.5.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2015 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,51 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Purbalingga, angka ini meningkat dibanding pada tahun 2010 sebesar 3,38 persen. Trend peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2011-2013 yaitu sebesar berturut-turut 4,18 persen, 5,18 persen dan 5,64 persen. Trend laju pertumbuhan kategori jasa pendidikan mengalami pelambatan setelah pada tahun 2011 mencapai 20,97 persen dan 2012 sebesar 24,71 persen sedang pada tahun 2013 hingga 2015 berturut-turut tumbuh positif 9,36 persen, 9,98 persen dan 6,15 persen.

2.5.16 Jasa Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Kategori jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial mencakup kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial cukup luas cakupannya. Secara ekonomi kelompok kategori kesehatan dan kesejahteraan sosial peranannya terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga selalu kurang dari satu persen, namun demikian ada kecenderungan peningkatan peran dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut peranan pada tahun 2011 hingga 2015 adalah 0,85 persen, 0,93 persen, 0,97 persen, 0,98 persen dan 0,99 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya terjadi pelambatan pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 7,27 persen dibanding dengan tahun 2014 yang melaju dengan kecepatan 9,50 persen.

2.5.17 Jasa Lainnya

Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga berfluktuatif dan relatif kecil yaitu dalam kisaran 1,70 persen hingga dua persen. Demikian juga pada laju pertumbuhannya berfluktuatif antara 1,50 persen hingga 10 persen. Pertumbuhan tertinggi dari kategori ini dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,23 persen dan terendah sebesar 1,73 persen terjadi pada tahun 2011.



1. Kebijakan Keuangan

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah BAPPEDA bukan merupakan SKPD yang mempunyai TUPOKSI sebagai pengelola pendapatan daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2016 diarahkan untuk penyusunan perencanaan yang bersifat *aspasia* maupun *spasial* serta kegiatan pendukung perencanaan seperti penyiapan data statistik serta penelitian dan pengembangan IPTEK. Kegiatan di Bappeda disusun dan dilaksanakan dengan mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, penataan ruang, statistik serta penelitian dan pengembangan teknologi yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan IPTEK, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Jumlah dana APBD tahun 2016 yang dialokasikan ke BAPPEDA setelah perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,00 yang dimanfaatkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 36 PNS dengan besaran anggaran sebesar Rp 2.889.263.000,00 dan sisanya sebesar Rp 5.764.386.000,00 untuk membiayai sejumlah 43 kegiatan belanja langsung. Rincian Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.304.071.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.000.265.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 460.050.000,00

Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2016 sebesar 95,08 persen atau sebesar Rp 2.747.144.202,00 dan Belanja Langsung sebesar 82,06 persen atau sebesar Rp 4.730.013.617,00. Secara rinci kebijakan keuangan terdapat pada lampiran LKD ini.

Secara normatif kebijakan keuangan tahun 2016 SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga mengacu pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor : 903/11 Tahun 2015 dan Nomor : 170/08 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 serta Nomor : 903/12 Tahun 2015 dan Nomor : 170/03 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016 serta



Perubahan KUA tahun 2016 Nomor : 903/4 Tahun 2016 dan 170-05.1 tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016, Perubahan PPAS Nomor : 903/5 tahun 2016 dan 170-05.2 tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Dengan mempedomani kedua hal tersebut kami tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan belanja agar pelayanan tetap berjalan.

Terselenggaranya penatausahaan keuangan dan kekayaan daerah SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga yang memenuhi azas manfaat, hemat, tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 di bidang belanja daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
- f. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas;
- g. Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan program dan kegiatan serta Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Purbalingga;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan alat telekomunikasi, pemakaian air, pemakaian gas, pemakaian listrik dan pemakaian alat elektronik lainnya untuk menekan biaya langganan;
- i. Penyelenggaraan rapat kerja / rapat dinas, pertemuan dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan dibatasi untuk hal-hal yang sangat penting dan penyelenggaraan kegiatannya menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Bappeda dan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8/Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2016 tanggal



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

27 Juli 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta membiayai berbagai kegiatan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bappeda Kabupaten Purbalingga hanya melaksanakan kebijakan bidang belanja daerah tahun 2016 dengan jumlah dana yang dialokasikan sebelum perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 7.996.881.000,00 terdiri 36 kegiatan, adapun jumlah anggaran setelah perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,00 terdiri 44 kegiatan 5 program dengan realisasi sebesar Rp 7.479.197.181,00 atau 86,43 persen dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.889.263.000,00 realisasinya Rp 2.747.144.202,00 atau 95,08 persen, sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 5.764.386.000,00 realisasinya sebesar Rp 4.732.053.617,00 atau 82,09 persen. Jumlah anggaran yang dikelola Bappeda mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Kelompok Belanja	2014		2015		2016	
		Rp	Keg.	Rp	Keg.	Rp	Keg.
1.	Belanja Tidak Langsung	2.462.147.000,00	1	2.706.555.000,00	1	2.889.263.000,00	1
2.	Belanja Langsung	4.308.006.000,00	44	4.701.149.000,00	44	5.764.386.000,00	42
	Jumlah	6.770.153.000,00	45	7.407.704.000,00	45	8.653.649.000,00	43

Adapun realisasi serapan anggaran dari tahun 2014 semakin meningkat, meskipun pada tahun 2016 persentasenya menurun dibanding tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Data Perkembangan Realisasi Belanja SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Kelompok Belanja	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.429.975.549	98,69	2.589.219.123	95,66	2.747.144.202	95,08
2.	Belanja Langsung	3.781.451.911	87,78	3.985.269.802	84,77	4.732.054.318	82,06
	Jumlah	5.907.966.438	93,22	6.574.488.925	88,75	7.479.198.520	86,43

Untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,00 terdiri 42 kegiatan langsung dengan 6 program dan satu kegiatan belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan pegawai dengan realisasi sebesar Rp



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

7.479.198.520,00 atau 86,43 persen, penyerapan masing-masing kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

Bappeda Kabupaten Purbalingga

	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo Berlebih/ Berkurang	
				1	2
	BELANJA	8.653.649.000	7.479.198.520	1.174.450.480	86,43
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.889.263.000	2.747.144.202	142.118.798	95,08
1	Gaji , Tunjangan dan Penghasilan Pegawai	2.889.263.000	2.747.144.202	142.118.798	95,08
	BELANJA LANGSUNG	5.764.386.000	4.732.054.318	1.032.331.682	82,09
	Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	840.000.000	671.106.179	168.894.621	79,89
2	Fasilitasi Penyelegaraan Penataan Ruang Daerah	60.000.000	41.032.453	18.967.547	68,39
3	Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Purbalingga	350.000.000	345.431.048	4.569.752	98,69
4	Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau	155.000.000	23.345.678	131.654.322	15,06
5	Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga tahun 2011-2031	75.000.000	67.251.500	7.748.500	89,67
6	Penyusunan DED Pelebaran Jalan Onje dan Jalan Jambukarang	50.000.000	47.525.000	2.475.000	95,05
7	Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga	50.000.000	47.442.500	2.557.500	94,89
8	Penyusunan Tapak Wisata Panusupan	50.000.000	49.503.500	496.500	99,01
9	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Serang	50.000.000	49.574.500	425.500	99,15
	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.385.651.000	1.236.788.635	148.862.365	89,26
10	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	433.704.000	388.201.818	45.502.182	89,51
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	299.685.000	299.665.265	19.735	99,99
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	349.912.000	288.159.625	61.752.375	82,35
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	262.350.000	229.812.000	32.538.000	87,60
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	16.194.927	3.805.073	80,97
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	20.000.000	14.755.000	5.245.000	73,78
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	929.209.000	850.487.188	78.721.812	91,53
16	Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016	62.770.000	58.342.617	4.427.383	92,95
17	Penyusunan RKPD Tahun 2017	140.000.000	135.635.250	4.364.750	96,88
18	Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017	100.554.000	98.096.012	2.457.988	97,56
19	Penyusunan RPJMD 2016-2020	281.000.000	259.965.056	21.034.944	92,51
20	Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan tahun 2016	15.630.000	12.259.400	3.370.600	78,44
21	Penyusunan RKPD Perubahan 2016	100.000.000	82.532.871	17.467.129	82,53
22	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016	75.000.000	72.129.311	2.870.689	96,17
23	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2015-2020	114.255.000	96.555.671	17.699.329	84,51
24	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	40.000.000	34.971.000	5.029.000	87,43
	Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.647.073.000	1.406.181.392	240.891.608	85,37
25	Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK ,Bantuan Gubernur	72.500.000	61.445.575	11.054.425	84,75
26	Fasilitasi FEDEP	120.000.000	112.145.200	7.850.800	93,45
27	Pendampingan Program WISMP	215.000.000	208.884.886	6.115.114	97,16
28	Evaluasi RKPD Tahun 2016	81.950.000	77.338.050	4.611.950	94,37
29	Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	171.000.000	159.151.013	11.848.987	93,07
30	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bangub)	223.100.000	129.276.605	93.823.395	57,96
31	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	25.000.000	24.134.000	866.000	96,54
32	Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	58.832.595	1.167405	98,05
33	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.000.000	75.233.467	4.766.533	94,04
34	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	50.000.000	46.179.100	3.820.900	92,36
	No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih lebih/ kurang
35	Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)	135.800.000	118.451.637	17.348.363	87,22
36	WISMP	223.543.000	197.867.702	25.675.298	88,51
37	Pendampingan Program Nasional Bidang keciptakaryaan	74.180.000	50.146.490	24.033.510	67,60
38	Pendidikan Untuk Semua (Bangub)	65.000.000	39.779.600	25.220.400	61,20



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

39	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	50.000.000	47.315.571	2.684.429	94,63
	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	662.453.000	280.051.099	24.948.901	91,82
40	Penyusunan data dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	230.000.000	207.491.349	22.508.651	90,21
41	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD (Bangub)	75.000.000	72.559.750	2.440.250	96,75
	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	300.000.000	287.439.825	12.560.175	95,81
42	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	150.000.000	148.359.150	1.640.850	98,91
43	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah	150.000.000	139.080.675	10.919.325	92,72

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran ada yang di atas persentase total realisasi anggaran dan terdapat beberapa kegiatan yang persentase realisasi anggarannya berada di bawah persentase total realisasi anggaran dari lima program tahun 2016 yang uraian singkatnya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

a. Maksud dari belanja tidak langsung adalah belanja yang diterima sebagai kompensasi kerja pegawai sipil aparatur negara berupa gaji dan tunjangan berupa gaji pokok PNS/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, iuran jaminan kematian, iuran jaminan kecelakaan kerja serta belanja tambahan penghasilan PNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Dasar Hukum

1. PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS;
2. PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun atau tunjangan ke 13 kepada PNS
3. PP Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Ke 14 tahun 2016
4. Surat Edaran Pj Sekretaris daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 903/0276 tanggal 18 Januari 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2016.

c. Anggaran belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp 2.889.263,00 realisasinya Rp 2.747.144.202,00 atau 95,08 persen berada di atas persentase total realisasi anggaran berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai.

d. Sasaran Belanja Tidak langsung adalah pegawai ASN Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 berjumlah 39 orang terdiri dari golongan IV berjumlah 6 orang, golongan III berjumlah 30 orang dan golongan II berjumlah 3 orang, serta tunjangan keluarga berupa tunjangan suami/istri berjumlah 39 orang, tunjangan anak berjumlah 46 orang. Adapun



tunjangan jabatan untuk jabatan dengan eselon II.b berjumlah satu orang, Eselon III.a berjumlah satu orang, Eselon III.b berjumlah 4 orang dan eselon IV berjumlah 15 orang.

Sementara untuk tambahan penghasilan pegawai (Tamsilpeg) dibayarkan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 berdasarkan beban kerja berjumlah 39 orang terdiri dari Kepala Bappeda satu orang, Sekretaris berjumlah satu orang, Kepala Bidang berjumlah 4 orang, Kasubag pada Sekretariat berjumlah 3 orang, Kepala Sub Bidang berjumlah 12 orang dan Staf Bappeda 18 orang.

e. Hambatan : Tidak ada

2. Belanja Langsung

Belanja langsung tahun anggaran 2016 Bappeda Kabupaten Purbalingga dianggarkan sebesar Rp 5.764.386.000 realisasinya sebesar Rp 4.732.054.318,00 atau 82,09 %. Adapun realisasi kegiatan masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah.

Program penataan dan pengendalian ruang daerah terdiri dari 8 kegiatan dengan anggaran Rp. 840.000.000, realisasi Rp. 671.106.179 (79,89%), antara lain:

	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo Berlebih/berkurang	%
1	2	3	4	5	
	Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	840.000.000	671.106.179	168.893.682	79,89
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	60.000.000	41.032.453	18.967.547	68,39
2	Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Purbalingga	350.000.000	345.431.048	4.568.952	98,69
3	Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau	155.000.000	23.345.678	131.654.322	15,06
4	Peninjauan Kembali Perda Nomor5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga Tahun 2011-2031	75.000.000	67.251.500	7.748.500	89,67
5	Penyusunan DED Pelebaran jalan Onje dan jalan jambu karang	50.000.000	47.525.000	2.475.000	95,05
6	Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga	50.000.000	47.442.500	2.557.500	94,89
7	Penyusunan Tapak Wisata Panusupan	50.000.000	49.503.500	496.500	99,01
8	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Serang	50.000.000	49.574.500	425.500	99,15

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kegiatan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b) Hasil kegiatan adalah diterbitkannya 104 surat rekomendasi tata ruang oleh BKPRD Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 68 surat rekomendasi



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- sesuai dengan tata ruang dan 36 surat rekomendasi tidak sesuai serta 51 jawaban tentang informasi tata ruang.
- c) Sasarannya adalah terlanyarnya masyarakat dalam mendapatkan informasi tata ruang dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 41.032.453,- (68,39%).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 2) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
- a) Maksud pelaksanaan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai salah satu tahapan dalam proses Peninjauan Kembali Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga; Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
 - b) Hasil kegiatan adalah (1) Dokumen Materi teknis Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga; (2) Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Review RTRW Kabupaten Purbalingga
 - c) Sasaran Kegiatan : Mengkaji struktur ruang dan pola ruang serta pemanfaatannya yang memiliki pengaruh dan potensi strategis dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga
 - d) Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi Rp. 344.361.048,00 (98,39 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 3) Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau
- a) Maksud program dan kegiatan Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau yaitu Memfasilitasi kegiatan dari pusat yang diimplementasikan di Kabupaten/Kota
 - b) Hasil kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan EcoDistrict, P3KP dan Kota Hijau.
 - c) Sasarannya adalah Pemerintah, masyarakat, pegiat lingkungan dan komunitas peduli lingkungan
 - d) Anggaran sebesar Rp.155.000.000,- realisasi Rp. 13.345.678,- (8,61 %).



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- e) Permasalahan yang dihadapi adalah Tahun 2016 tidak ada kegiatan dari pusat yang dapat dilaksanakan oleh Pegiat Lingkungan sehingga penyerapan anggaran hanya ± 8,61%.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah Koordinasi dengan Kementerian yang membidangi.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan adalah Program P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau merupakan program berkelanjutan sampai dengan tahun 2018 sehingga dukungan kegiatan dan dana dari Pemerintah Daerah harus ada.
- 4) Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga dengan maksud : (1) Melaksanakan tahapan proses peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga; (2) Untuk menyiapkan bahan dalam pengambilan keputusan pada proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten Purbalingga
 - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen Materi teknis hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga
 - c) Sasarannya adalah Rekomendasi tentang RTRW perlu atau tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW
 - d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 67.251.500,- (89,67 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 5) Penyusunan DED Pelebaran Jalan Onje dan Jalan Jambukarang
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa.
 - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang
 - c) Sasarannya adalah peningkatan kapasitas jalan Onje dan Jalan Jambukarang dapat berjalan dengan baik.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.525.000,- (95,05 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.



- 6) Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa dan sekaligus memiliki fungsi ruang terbuka hijau.
 - b) Hasil kegiatan adalah dokumen DED Alun-alun Purbalingga
 - c) Sasarannya adalah meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau dan fungsi sosial ekonomi kota
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.442.500,- (94,89 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 7) Penyusunan Tapak Wisata Panusupan
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan tapak wisata panusupan dalam rangka mendukung dan menfasilitasi pengembangan desa wisatapanusupan lebih tertata dan terencana.
 - b) Hasil kegiatan adalah dokumen Tapak Wisata Panusupan
 - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata Panusupan
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.503.500,- (90,01 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 8) Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Serang
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan rencana tata ruang desa Serang dalam rangka mendukung dan menfasilitasi pengembangan desa wisataserang lebih tertata dan terencana.
 - b) Hasil kegiatan adalah dokumen Rencana Tata Ruang Desa Serang
 - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata serang
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.574.500,- (99,15 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

2. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program penguatan kelembagaan perangkat daerah Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.385.651.000,00 realisasinya Rp



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

1.047.586.495,00 atau 89,26 %. Enam kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo Berkurang/berlebih	%
					1
	Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah	1.385.651.000	1.236.788.635	148.862.365	89,26
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	433.704.000	388.201.818	45.502.182	89,51
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	299.685.000	299.665.265	19.735	99,99
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	349.912.000	288.159.625	61.752.375	82,35
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	262.350.000	229.812.000	32.538.000	87,60
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	16.194.927	3.805.073	80,97
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	20.000.000	14.755.000	5.245.000	73,78

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - b) Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-lata listrik, perangko dan materai, peralatan kebersihan, gas, umbul-umbul, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, fotocopy dan makan minum
 - c) Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - d) Anggaran kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran ini sebesar Rp 433.704.000,-realisasinya sebesar Rp 414.417.859,- atau 95,55 %.
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Upaya Pemecahan Masalah: tidak ada.
- 2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah
 - b) Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
 - c) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mengadakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah
 - d) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 299.685.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 299.685.000,- atau 100,00 %.
 - e) Permasalahan yang dihadapi: banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

f) Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran.

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b) Hasil kegiatan yaitu terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
- c) Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasarana kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
- d) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp349.912.000,- dan realisasinya sebesar Rp 289.300.125,- atau 82,68 %.
- e) Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi (IT)
- f) Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- b) Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan mapun spesifikasinya, adapun aset yang dipelihara pada Bappeda Kabupaten Purbalingga adalah sebagai sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|--------|
| (1) Sepeda Motor | : | 5 buah |
| (2) Rak Arsip | : | 4 buah |
| (3) Filling Kabinet | : | 4 buah |
| (4) Kursi Tamu | : | 1set |
| (5) AC Split | : | 1 buah |
| (6) Note book | : | 7 buah |
| (7) Komputer PC | : | 1 buah |
| (8) Hardisk External | : | 2 buah |
| (9) Printer | : | 4 buah |
| (10) Garasi Mobil | : | 1 buah |



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
 - d) Anggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor tahun 2016 sebesar Rp. 262.350.000,- dan realisasinya Rp 229.812.000,- atau 87,60 %.
 - e) Permasalahan yang dihadapi, tidak ada.
 - f) Upaya Pemecahan Masalah, tidak ada.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- a) Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
 - b) Hasil kegiatan adalah pengiriman peserta baik seminar, diklat dan sosialisasi.
 - c) Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud.
 - d) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 16.194.927,- atau 80,97 %.
 - e) Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.
- 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
- a) Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
 - b) Hasil Kegiatan adalah 1 dokumen renja SKPD, 1 dokumen LKD, 1 Dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJ Ip.
 - c) Sasaran dari kegiatan ini adalah agar program dan kegiatan Bappeda dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi.
 - d) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 18.425.000,- atau 92,13 %.
 - e) Permasalahan yang Dihadapi : penyusunan LKPJ dan LKJ IP tergantung pada penyelesaian dari seluruh SKPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJ IP sering terlambat,
 - f) Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.



3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.929.209.000,00 realisasinya Rp.850.487.188 atau 91,53% sebagaimana daftar berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah		Saldo	
		Anggaran	Realisasi	Berlebih/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	929.209.000	850.487.188	78.721.812	91,53
1	Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016	62.770.000	58.342.617	4.427.383	92,95
2	Penyusunan RKPD Tahun 2017	140.000.000	135.635.250	4.364.750	96,88
3	Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017	100.554.000	98.096.012	2.457.988	97,56
4	Penyusunan RPJMD 2016 – 2020	281.000.000	259.965.056	21.034.944	92,51
5	Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan th 2016	15.630.000	12.259.400	3.370.600	78,44
6	Penyusunan RKPD Perubahan 2016	100.000.000	82.532.871	17.467.129	82,53
7	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016	75.000.000	72.129.311	2.870.689	96,17
8	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2015-2020	114.255.000	96.555.671	17.699.329	84,51
9	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	40.000.000	34.971.000	5.029.000	87,43

1) Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016

- a) Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan mendapatkan masukan rancangan awal RKPD tahun 2017.
- b) Hasil kegiatan terlaksananya diskusi pembangunan yang dihadiri 320 peserta dari komisi-komisi DPRD, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan para Kepala SKPD, para Camat, kasi ekbang dan delegasi kecamatan, perguruan tinggi, instansi vertikal, perbankan, BUMD, Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi usaha dan LSM, paguyuban kepala desa (Wirapraja) dan forum komunikasi perangkat desa (FK Persada), pemangku kepentingan lainnya. Terlaksananya 4 forum diskusi kelompok yaitu bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup dan infrastruktur wilayah, bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Terserapnya aspirasi masyarakat sebanyak 1132 usulan kegiatan atau sebesar Rp 422.153.053.000,-
- c) Sasaran kegiatan adalah terselenggaranya forum musyawarah perencanaan pembangunan yang transparan, demokratis dan akuntabel.
- d) Anggaran jumlah anggaran Rp 62.770.000,- Realisasi Rp 58.342.617,- atau 92,95 %.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- e) Permasalahan : masih rendahnya usulan untuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia sebesar 13 persen (pendidikan dan kesehatan) dan masih didominasi oleh usulan infrastruktur yakni sebesar 54 %.
 - f) Solusi : sosialisasi pentingnya pembangunan kesehatan dan pendidikan dilingkungan masyarakat.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
 - h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 2) Penyusunan RKPD Tahun 2017
- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
 - (1) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017;
 - (2) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
 - (3) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
 - (4) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
 - c) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 300 buku RKPD Musrenbangkab Tahun 2016, 200 buku rancangan teknokratis awal RKPD tahun 2017, 100 buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017.
 - d) Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
 - e) Anggaran : Rp.140.000.000,- realisasi Rp.135.635.290 (96,88 %)
 - f) Permasalahan tidak ada.
 - g) Solusi tidak ada.
 - h) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
 - i) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

3) Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017

- a. Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2017 adalah :
 - 1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2017;
 - 2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku; dan
 - 4) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD
- b. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 80 buku KUA Tahun 2017, 80 buku PPAS Tahun 2017.
- c. Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Anggaran sebesar Rp.100.554.000,- realisasi Rp. 98.096.012,- (97,56%)
- e. Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- f. Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
- h. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

4) Penyusunan RPJMD 2016 – 2021

- a. Maksud kegiatan adalah (1) melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. (2) RPJMD 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Daerah (Renstra PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat SKPD; (4)RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- b. Sasaran kegiatan : DPRD, Seluruh OPD, seluruh komponen masyarakat dan *stakeholders* terkait.
 - c. Hasil kegiatan : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Program Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.
 - d. Anggaran sebesar Rp. 281.000.000 dengan realisasi anggaran : Rp. 259.965.056,- atau 92,51 persen.
 - e. Permasalahan yang dihadapi : Terbitnya peraturan / regulasi baru berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang berimplikasi kepada harus disesuaikannya prosedur, tata cara serta substansi RPJMD, yang membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama diantara segenap penyusun.
 - f. Solusi yang ditempuh : Melaksanakan Bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kementerian dalam negeri, Kementerian PAN-RB, Bappeda Provinsi, dll) serta saling komunikasi dengan kabupaten/Kota lain.
 - g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
 - h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- 5) Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan tahun 2016
- a. Maksud Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah adalah memberikan arahan dalam tataran teknokratik atas pelaksanaan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab serta dalam penyusunan Renja SKPD.
 - b. Hasil kegiatan adalah (1) Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2016 untuk penyusunan RKPD tahun 2017; (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk penyusunan RKPD tahun 2018
 - c. Sasarannya yaitu adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.;
 - d. Anggaran sebesar Rp.15.630.000,-realisasi Rp. 12.259.400,- (78,44 %)



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD.
- f. Permasalahan yang dihadapi tidak ada
- g. Solusi yang ditempuh tidak ada.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
- i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

6) Penyusunan RKPD Perubahan 2016

- a. Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan adalah :
 - (1) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2016;
 - (2) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - (3) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - (4) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016.
- c. Hasil kegiatan adalah tersusunnya, 80 buku Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2016
- d. Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi Rp 82.975.671,- (82,98 %)
- f. Permasalahan tidak ada.
- g. Solusi tidak ada.
- h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
- i. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

7) Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016

- a. Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2016 adalah



- (1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016;
 - (2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - (4) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan.
- b. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 80 buku KUA Perubahan Tahun 2016, 80 buku PPAS Perubahan Tahun 2016.
- c. Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-realisasi Rp. 68.816.131,- (91,76%)
- e. Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- f. Solusi konsultasi kepemerintah pusat dan provinsi.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
- h. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 8) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2016-2021
- a. Maksud dari penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah : (1) Melakukan Kajian tentang dampak lingkungan terhadap dokumen penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; (2) Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan sudah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Hasil kegiatan adalah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga
 - c. Sasarannya adalah Menilai kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sudah melihat/memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - d. Anggaran sebesar Rp.114.250.000,-realisasi Rp.96.555.671,- (84,51 %).
 - e. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

9) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 2 (dua) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- b. Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana.
- c. Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- d. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.100.000,- atau 97,75 %.
- e. Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan untuk diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana.
- f. Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikunya agar menyesuaikan standarisasi dan volumenya.

4. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terdiri dari 15 kegiatan dengan anggaran Rp 1.388.101.000,00 realisasinya Rp.1.118.379.897,00 atau 80,57%, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2016

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo Berkurang/ berlebih	
				1	2
	Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pemb Daerah	1.647.073.000	1.406.181.491	240.891.509	85,37
1	Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK dan Bantuan Gubernur	72.500.000	61.445.575	11.054.425	84,75
2	Fasilitasi FEDEP	120.000.000	112.145.200	7.854.800	93,45
3	Pendampingan Program WISMP	215.000.000	208.884.886	6.115.114	97,16
4	Evaluasi RKPD Tahun 2016	81.950.000	77.338.050	4.611.950	94,37
5	Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	171.000.000	159.151.013	11.848.987	93,07
6	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bangub)	223.100.000	129.276.605	93.823.395	57,95
7	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil	25.000.000	24.134.000	866.000	96,54
8	Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	58.832.595	1.167.405	98,05
9	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.000.000	75.233.467	4.766.533	94,04
10	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	50.000.000	46.179.100	3.820.900	92,36
11	Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)	135.800.000	118.451.637	17.348.363	87,23
12	WISMP	223.543.000	197.867.702	25.675.298	88,51



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

13	Pendampingan Program Nasional Bidang Keciptakaryaan	74.180.000	50.146.490	24.033.510	67,60
14	Pendidikan Untuk Semua (Bangub)	65.000.000	39.779.600	25.220.400	61,20
15	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bangub)	50.000.000	47.315.571	2.684.429	94,63

1) Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK dan Bantuan Gubernur

- a. Maksud kegiatan : Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK, dan Ban-Gub dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan bersumber dana TP, DAK, dan Ban-Gub
- b. Sasaran kegiatan: Seluruh OPD khususnya pengampu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Gubernur (Ban-Gub) Tahun 2016.
- c. Hasil kegiatan: Laporan Triwulan kegiatan DAK, TP, dan Ban-Gub tahun 2016.
- d. Anggaran sebesar Rp. 72.500.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 61.445.575,- (Enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 84,75 persen
- e. Permasalahan yang dihadapi : Belum semua OPD dapat melaporkan kegiatan secara tepat waktu, sehingga menghambat kelancaran dalam pelaporan ke Provinsi.
- f. Solusi yang ditempuh : Meminta/menajih laporan secara intensif sampai pada jemput bola ke masing-masing OPD.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : baik
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

2) Fasilitasi FEDEP

- a. Maksud Kegiatan: FEDEP adalah memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha sebagai mitra pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Dan memberikan fasilitasi kepada pelaku ekonomi lokal khusunya UMKM dengan pendekatan klaster agar bisa meningkatkan kemampuan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk daerah
- b. Hasil Kegiatan : (1) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pelaku UMKM; (2) Adanya koordinasi yang baik antara pokja FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Provinsi Jawa Tengah dengan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) Kabupaten Purbalingga; (3) Promosi produk unggulan melalui kegiatan pameran.
- c. Sasaran kegiatan : (1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM; (2) Meningkatnya promosi produk dan potensi ekonomi local;



- (3) Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- d. Anggaran sebesar Rp. Rp. 120.000.000,00 dan realisasi anggaran : sebesar Rp. 112.155.200 , - (93 %)
 - e. Permasalahan yang dihadapi : Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
 - f. Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
 - g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitasnya.
 - h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.

3) Pendampingan Program WISMP

- a. Maksud Kegiatan: (1) penyediaan Dana pendampingan sebagai salah satu syarat luncuran dana *LOAN* dalam kegiatan WISMP setiap tahunnya. (2) Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A dalam PPSIP
- b. Hasil Kegiatan : (1) Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP Pengadaan Kendaraan Operasional kegiatan WISMP (2) Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM
- c. Sasaran Kegiatan : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
- d. Anggaran sebesar Rp.215.000.000,- realisasi Rp. 208.884.886,-(97,16)
- e. Permasalahan yang dihadapi: Masih adanya konflik perebutan air
- f. Solusi yang ditempuh : Rapat - rapat koordinasi
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:baik
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- i. Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
- j. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

4) Evaluasi RKPD Tahun 2016

- a. Maksud kegiatan : 1. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2015 dengan mendasarkan pada target tahun 2015, sekaligus mengetahui kendala yang dijumpai dalam pencapaian target, sehingga dapat ditentukan prioritas pembangunan pada tahun mendatang; 2. Menyediakan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan dan RKPD tahun depan;
- b. Sasaran kegiatan : Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) kabupaten Purbalingga



- c. Hasil kegiatan : Tersedianya hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
- d. Anggaran sebesar Rp. 81.950.000,- dan Realisasi anggaran : Rp. 77.338.050,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau 94.37 persen.
- e. Permasalahan yang dihadapi : Masih relatif rendahnya kesadaran beberapa OPD terkait pentingnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghambat kelancaran pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Solusi yang ditempuh: Sosialisasi dan Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang kewajiban OPD dalam evaluasi Rencana Kerja masing-masing.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

5) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata

- a. Maksud kegiatan :
 - (1) Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga.
 - (2) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaran Tri Dharma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - (3) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
 - (4) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (5) Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
- b. Sasaran kegiatan :
 - (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
 - (2) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.



- (3) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- c. Hasil kegiatan :
- (1) Terfasilitasinya mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
 - (2) Terlaksananya / teracakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - (3) Terdatanya permasalahan riil dalam masayarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
 - (4) Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
 - (5) Tersusnya laporan kegiatan KKN tahun 2016
- d. Anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 159.050.513,- (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah). atau 93,01 persen
- e. Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung di masyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat apilkasinya di masyarakat.
 - (2) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja
 - (3) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
 - (4) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- f. Solusi yang ditempuh :
- (1) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
 - (2) Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
 - (3) Optimalisasi koordinasi dengan OPD SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -



6) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bangub)

a. Maksud kegiatan :

- (1) Penyelenggaran koordinasi dan konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Memperkuat dan mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.
- (3) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga
- (4) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- (5) Merumuskan kesepakatan, kebijakan dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektifitas program penanggulangan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari berbagai *stakeholder*.

b. Sasaran kegiatan :

- (1) OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- (2) Organisasi masyarakat yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan
- (3) BUMD Kabupaten Purbalingga
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga

c. Hasil kegiatan : Laporan hasil kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kebupaten Purbalingga

d. Inventarisasi berbagai permasalahan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

e. Hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

f. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

g. Realisasi anggaran: Rp. 129.276.605,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) atau 57.95 persen

h. Permasalahan yang dihadapi :

- (1) Relatif rendahnya capaian kinerja keuangan disebabkan karena belanja jasa pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan yang telah dianggarkan tidak dicairkan karena



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

berdasarkan hasil rapat koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan tanggal 1 Desember 2016 disampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah melalui TKPK sedang membuat SIM Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan on line dengan 35 kabupaten/ kota. Namun sampai dengan akhir Desember 2016 kami konfirmasikan ternyata SIM dimaksud belum siap didistribusikan kepada kabupaten/ kota.

- (2) Perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penguatan TKPK Kabupaten Purbalingga.
- (3) Belum semua OPD menggunakan single data dalam penentuan sasaran/ targetting program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

i. Solusi yang ditempuh :

- (1) Perlu ada kajian pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan guna mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan pada seluruh OPD.
- (2) Dalam rangka akurasi penentuan sasaran / targetting perlu dilakukan data tunggal dan tersosialisasikan kepada seluruh OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- (4) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -

7) Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil

a. Maksud Kegiatan:

- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan tersebut;
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
- b. Sasaran kegiatan :
- 1) Program dan kegiatan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - (a) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
 - (b) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di kabupaten Purbalingga.
- c. Hasil kegiatan :
- (1) Terpantau pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
 - (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
- d. Anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24,134.000,- (96,54%).
- e. Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil termonev semuanya;
 - (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil sebagai anggota tim Monev.
- f. Solusi yang ditempuh :
- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
 - (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : baik



8. Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Maksud Kegiatan : Terlaksananya pendampingan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan kelanjutan dari Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang juga merupakan kelanjutan dari Program PNPM Perkotaan serta pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di 44 Kelurahan/Desa pada 3 Kecamatan yaitu Purbalingga, Padamara dan Kalimanah sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan sanitasi (USRI).
- b. Hasil Kegiatan : Hasil kegiatan berupa dokumen laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur penanganan kawasan kumuh perkotaan di 5 kelurahan prioritas dan baseline dokumen perencanaan pencegahan dan penanganan kumuh di 44 Kelurahan/Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh (RPLP)
- c. Sasaran Kegiatan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hasil bentukan BKM di 44 Kelurahan/Desa pada 3 Kecamatan yaitu: Purbalingga, Padamara dan Kalimanah
- d. Anggaran sebesar Rp. 60.000.000.- dengan realisasi Anggaran Rp. 58.832.595,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen).
- e. Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan data-data teknis yang dimiliki serta belum adanya Pokja yang khusus menangani permasalahan perumahan dan permukiman serta pembangunan sanitasi di Purbalingga.
- f. Solusi yang ditempuh : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dan juga terhadap *stakeholders* lainnya terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.
- g. Kondisi sarana dan prasarana : Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

8) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Maksud kegiatan :
 - (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan tersebut;
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.

b. Sasaran kegiatan :

Program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga.

c. Hasil kegiatan :

- (1) Terpantau pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
- (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.

d. Anggaran : Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Realisasi anggaran : Rp. 61.352.217,00 (enam puluh satu juta rupiah tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

e. Permasalahan yang dihadapi :

- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait bidang Pemerintahan dan Kesra termonev semuanya;
- (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai anggota tim Monev.

f. Solusi yang ditempuh :

- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
- (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Kesra.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

9) Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu:
 - (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasiakan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (*output*).
 - (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (*outcome*) dan sisi manfaat (*benefit*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - (3) Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan.
 - (4) Mendapatkan data-data dan fakta sebagai *informdecision* guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.
- b. Hasil kegiatan adalah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2016 yang berisi hasil *FocusGroupDiscussion* (FGD) sektor Pariwisata dan Pertanian serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan
- c. Sasarannya adalah program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang ekonomi diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM, pariwisata, perdagangan, perindustrian, jasa dan keuangan, desa berdikari serta ketenaga kerjaan.
- d. Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 46.179.100,- (Empat puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau sebesar 92, 36% (Sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen).
- e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2016, Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016.
- f. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak



semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.

- g. Solusi yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun *schedule* yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di SKPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiensikan dari sisi waktu pelaksanaan.
- h. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sangat baik dan mendukung terlaksananya program dan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi

10) Fasilitasi *Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)*

- a. Maksud Kegiatan : Melakukan inventarisasi penyebab emisi dan sektor penyumbang emisi terbesar di Purbalingga sebagai dukungan pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau untuk sektor berbasis lahan di Kabupaten Purbalingga dengan tujuan memberikan rekomendasi, intervensi dan referensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang mendukung penurunan emisi serta meningkakan nilai ekonomis yang tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- b. Hasil Kegiatan : Dokumen *Low Emission Development (LED)* Kabupaten Purbalingga.
- c. Sasaran kegiatan : Aksi mitigasi pembangunan rendah emisi ini menasarkan pada sektor berbasis lahan (Kehutanan ,Pertanian dan Alih fungsi lahan).
- d. Anggaran sebesar Rp. 135.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.624.538,- (88 %).
- e. Permasalahan yang dihadapi : Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
- f. Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitas nya.
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.

11) WISMP

- a. Maksud Kegiatan : Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A
- b. Hasil Kegiatan: 1. Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP; 2.Terselenggaranya Revitalisasi Kepengurusan Kelembagaan Komisi Irigasi; 3 .Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM; 4. Tersedianya dokumen laporan kegiatan Masing-masing TPM di Daerah Irigasinya; 5. Tersedianya dokumen laporan triwulan KTPM
- c. Sasaran Kegiatan : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
 - d. Anggaran sebesar Rp.223.543000,- realisasi Rp.197.867.702,- (88,51%)
 - e. Permasalahan yang dihadapi : -
 - f. Solusi yang ditempuh : -
 - g. Kondisi sarpras yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
 - h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tahun 2016 telah dilaksanakan Revitalisasi Kepengururan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) tetapi belum dikukuhkan/dilantik sehingga tahun 2017 diharapkan segera dilakukan pengukuhan pengurus KOMIR baru
- 12) Pendampingan Program Nasional Bidang Keciptakaryaan
- a) Maksud Kegiatan : Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang keciptakaryaan (air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman, dan persampahan).
 - b) Hasil Kegiatan : Terkoordinasinya pelaksanaan 5 Program Bidang Keciptakaryaan
 - c) Sasaran Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan program dan terfasilitasinya usulan program bidang keciptakaryaan
 - d) Anggaran sebesar Rp. 74.180.000,00 dengan realisasi Anggaran : Rp. 50.146.490,00
 - e) Permasalahan yang dihadapi : -
 - f) Solusi yang ditempuh : -
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- 13) Pendidikan Untuk Semua (Bangub)
- a) Maksud kegiatan :
 - (1) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
 - (2) Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga
 - (3) Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kinerja Forum Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai wadah koordinasi antar *stakeholder*.
 - (4) Mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Purbalingga.



- (5) Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
 - (6) Sebagai bentuk fasilitasi dan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
 - (7) Memberikan rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan
 - (8) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
- b) Sasaran kegiatan :
- (1) OPD yang mengampu program dan kegiatan bidang pendidikan
 - (2) BPS dan Kantor Kementerian Agama
 - (3) UPT Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan
 - (4) K3S SD dan MKKS SMP, SMA, dan SMK
 - (5) Kwarcab Gerakan Pramuka Pramuka
 - (6) Para Pengawas dan Penilik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
 - (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga
- c) Hasil kegiatan :
- (1) Terpantau pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan
 - (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan, maka akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
 - (3) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
 - (4) Teridentifikasi dan terpetakan permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
 - (5) Terfasilitasinya upaya yang sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
 - (6) Diperolehnya rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

(PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan

- (7) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
 - (8) Terlaksananya Rapat Koordinasi PUS
 - (9) Terlaksananya Workshop PUS
 - (10) Tersusunnya laporan akhir Pendidikan Untuk Semua.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Dan realisasi anggaran : Rp. 39.779.600 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 61.20 persen
 - e) Permasalahan yang dihadapi :
 - (1) Relatif rendahnya capaian keuangan karena adanya pertimbangan efisiensi anggaran ketika ada informasi penundaan transfer DAU dari pusat, sehingga kegiatan penyusunan laporan PUS yang telah dianggarkan dan sedianya dilakukan dengan teknis konsinering dan dilaksanakan di luar kantor, dalam realisasinya dilakukan di dalam kantor, sehingga jasa akomodasi dan sewa gedung/ kantor tidak direalisasikan.
 - (2) Tidak semua kegiatan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam OPD terpantau dan termonev semuanya ;
 - (3) Perlunya koordinasi yang lebih intensif dan upaya lebih optimal guna peningkatan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan
 - (4) Perlunya penguatan kelembagaan Pendidikan untuk Semua baik kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua maupun Sekretariat Forum Pendidikan untuk Semua.
 - (5) Perlunya penyediaan data yang valid dan akurat dalam rangka penghitungan capaian target kinerja Pendidikan Untuk Semua.
 - f) Solusi yang ditempuh :
 - (1) Perlunya penguatan kelembagaan PUS
 - (2) Kegiatan sebaiknya dimulai pada awal tahun anggaran.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- 14) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bangub)
- a) Maksud kegiatan :
 - (1) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan yodium
 - (2) Pengendalian peredaran garam konsumsi



- (3) Pemantauan dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar
- (4) Pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di masyarakat.
- b) Sasaran kegiatan :
 - (1) Pedagang garam pada pasar tradisional
 - (2) OPD yang mengampu kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan yodium, sosialisasi program pemerintah, dan OPD yang menangani penegakan regulasi
 - (3) Aparatur pemerintah daerah.
- c) Hasil kegiatan :
 - (1) Tersedianya alat titrasi iodometri test sebanyak 2 (dua) unit.
 - (2) Terambilnya sampel, terukurnya sampel, dan tersosialisasikannya hasil pemeriksaan sampel garam pada 13 pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga
 - (3) Terlaksananya pembinaan dan pemberian teguran bagi pedagang yang menjual garam konsumsi yang tidak mengandung yodium.
 - (4) Terlaksananya rapat koordinasi Pencegahan dan penanggulangan GAKY
- d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Realisasi anggaran : Rp. 47.315.571,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 94.63 persen
- e) Permasalahan yang dihadapi :
 - (1) Alat test garam yang tersedia kurang banyak sehingga sampel yang diperiksa menjadi terbatas.
 - (2) Perlunya pemeriksaan dan pemantauan secara periodik, minimal 3 kali dalam setahun sehingga dapat diperoleh data yang relatif akurat.
- f) Solusi yang ditempuh :
 - (1) Perlunya pengadaan alat dan refill titrasi kit pada tahun anggaran mendatang
 - (2) Penambahan intensitas pemeriksaan dan pemantauan pada tahun anggaran mendatang.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

5. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Program penyediaan data dan informasi pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2016 terdiri dari dua



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

kegiatan dengan anggaran Rp 423.743.000,00 realisasinya Rp 401.915.140,00 atau 94,85 %. Dua kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

**Anggaran Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Tahun 2016**

N o	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo Berkurang/ berlebih	
				4	5
	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	662.453.000	280.051.099	382.401.901	42,27
1	Penyusunan Data dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	230.000.000	207.491.349	22.508.651	90,21
2	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD (Bangub)	75.000.000	72.559.750	2.440.250	96,75

- 1) Penyusunan Data dasar dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan data untuk Perencanaan Pembangunan & Informasi kepada Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna data
 - b) Hasil Kegiatan : Tersedianya Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA); Buku Saku PDA; Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2016; Buku PDRB Kab. Purbalingga Tahun 2015, untuk SKPD dan wilayah Kecamatan; dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi Kab. Purbalingga Tahun 2016.
 - c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 207.491.349,- atau 90,21 persen.
 - e) Permasalahan yang dihadapi : Masih kurang memadainya sumber data dan kemampuan SDM pada OPD/SKPD dalam pengelolaan data dan informasi.
 - f) Solusi yang ditempuh : kerjasama/kolaborasi dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 2) Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD (Bangub)
 - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan dan Informasi kepada Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna Data
 - b) Hasil Kegiatan: Tersedianya 80 Buku SIPD kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan 78 Buku SIPD Kecamatan Tahun 2016



- c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
- d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 72.559.750,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97 persen
- e) Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya sumber data yang dimiliki oleh SKPD/ instansi tingkat Kabupaten, masih adanya inkonsistensi dan kesalahan dalam pengisian data oleh SKPD, kurangnya kesadaran akan pentingnya data, sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi yang belum memadai di tingkat SKPD, masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan informasi.
- f) Solusi yang ditempuh : Mengikutsertakan seluruh SKPD, Kecamatan dan BPS dalam keterisian data.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik;
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

6. Program Penelitian dan Pengkajian Daerah

Program Penelitian dan Pengkajian Daerah terdiri dari 2 kegiatan meliputi :

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo	%
					Berlebih/Berkurang
	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	300.000.000	287.439.825	12.560.175	95,81
1	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	150.000.000	148.359.150	1.640.850	98,91
2	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah	150.000.000	139.080.675	10.919.325	92,72

1) Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi ijin penelitian, kajian/ penelitian, diseminasi hasil litbang, lomba krenova dan pameran hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kab. Purbalingga;
- b) Hasil Kegiatan : Hasil kegiatan berupa terbitnya surat ijin penelitian sebanyak 595 surat; kajian sosial "Profil Perceraian Kabupaten Purbalingga Tahun 2015; Diseminasi "Ketahanan Keluarga"; Lomba Krenova Tingkat Kab. Purbalingga; Mengikuti Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Mengikuti pameran Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Solo.
- c) Sasaran Kegiatan : Para inventor, Akademisi, Instansi pemerintahan, Swasta dan Masyarakat.
- d) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan Realisasi Anggaran Rp. 148.359.150,- (Seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,9 persen.



- e) Permasalahan yang dihadapi : Masih rendahnya kualitas SDM dan motivasi dibidang penelitian dan pengembangan, masih rendahnya penerapan hasil ristek karena kurangnya informasi kemasyarakatan tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang ada.
 - f) Solusi yang ditempuh : Peningkatan motivasi dan kapasitas SDM litbang dengan melakukan kajian/penelitian dan mengadakan lomba krenova tingkat Kabupaten, mengikutsertakan para inventor/peneliti dalam lomba krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah; serta mensosialisasikan/diseminasi hasil litbang dan mengikuti ajang pameran sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan hasil ristek; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi *stakeholders* terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik, hanya saja tidak memiliki SDM litbang ;
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 2) Penyusunan Sistem Inovasi Daerah
- a) Maksud Kegiatan :
 - (1) Membuat rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar stakeholder (institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).
 - (2) Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546), pasal 3. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten/Kota dan pasal 5. Pasal 5 (ayat 2) Kebijakan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam: *Roadmap* penguatan SIDa; RPJMD; dan RKPD.
 - b) Hasil Kegiatan : Tersusunnya dokumen *Roadmap* Sistem Inovasi daerah Kab. Purbalingga Tahun 2017-2021.
 - c) Sasaran Kegiatan : Institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).
 - d) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan Realisasi Anggaran Rp. 130.080.675,- (Seratus tiga puluh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 92,72 persen.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

- e) Permasalahan yang dihadapi: Belum terintegrasi penguatan inovasi di Kabupaten Purbalingga dan adanya penataan OPD yang baru sehingga agak menyulitkan ketika membahas fokus program prioritas dan rencana aksi.
- f) Solusi yang ditempuh : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholders* dengan membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Purbalingga lewat Keputusan Bupati.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik.
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

Dengan mendasari pada Peraturan Bupati Nomor : 7 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berbasis akrual. Dalam kebijakan akuntansi belanja disebutkan bahwa belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan susunan :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Jasa

2. Belanja Modal

- Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Aset Tetap lainnya

Dari data realisasi anggaran Bappeda tahun 2016 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi	%	Realisasi 2015
1.	2.	3.	4.	2.
BELANJA	8.653.649.000	7.479.198.520	86,43	6.574.488.925
BELANJA OPERASI	8.193.599.000	7.501.686.520	86,06	6.166.576.425
Belanja Pegawai	4.193.334.000	3.715.844.202	88,61	2.589.219.123
Belanja Barang dan Jasa	4.000.265.000	3.335.842.318	83,39	3.577.357.302
BELANJA MODAL	460.050.000	427.512.000	92,93	407.912.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.600.000	375.112.000	92,03	407.912.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.450.000	52.400.000	99,90	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.653.649.000)	(5.554.095.111)	64,18	(6.574.488.925)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	(8.653.649.000)	(5.554.095.111)	64,18	(6.574.488.925)



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum, pengelolaan keuangan Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja tahun 2016 sebesar 86,43 % dari anggaran Rp 8.653.649.000,00 dengan realisasi Rp 7.479.198.520,00 terdiri 42 kegiatan dan 6 Program. Secara keseluruhan kinerja keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2015 dengan jumlah 5 program dan 45 kegiatan, namun jumlah anggaran tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015. Realisasi belanja SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

Tabel Program Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Purbalingga

	2016		
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran Berlebih/Berkurang
		Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	2.889.263.000	2.747.144.202	142.118.798 95,08
Belanja Langsung	5.764.386.000	4.732.054.318	1.032.331.682 82,09
Jumlah	8.653.649.000	7.479.198.520	1.174.450.480 86,43

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Jumlah anggaran 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,00 Realisasinya sebesar Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43 % terdiri dari :

Belanja Tidak Langung

Belanja tidak langsung Bappeda tahun anggaran 2016 terdiri dari gaji, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan pegawai dianggarkan sebesar Rp.2.889.263.000,00 realisasinya sebesar Rp 2.747.144.202,00 atau 95,08%.

Belanja Langung

Belanja langsung Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 terdiri dari 6 program dan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 5.764.386.000 realisasinya sebesar Rp 4.732.054.318,00 atau 87,52% sebagaimana tabel berikut :



Tabel Program Belanja Langsung Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Purbalingga

	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		% Berlebih/berkurang
				Berlebih/berkurang	%	
1	Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	5.764.386.000	4.732.054.318	1.032.331.682	82,09	
2	Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah	840.000.000	671.106.179	168.893.821	79,89	
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.385.651.000	1.236.788.635	148.862.365	89,26	
4	Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pemb Daerah	929.209.000	850.487.188	78.721.812	91,53	
5	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1.647.073.000	1.406.181.392	240.891.608	85,37	
6	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	662.453.000	280.051.099	382.401.901	42,27	
		300.000.000	287.439.825	12.560.175	95,81	

B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015, realisasi anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah realisasi anggaran tahun 2016 Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43 % dari anggaran Rp 8.653.649.000,00 mengalami kenaikan jika dibanding dengan realisasi anggaran 2015 sebesar Rp 6.574.488.925,00 atau 88,75 % dari anggaran sebesar Rp 7.407.704.000,00. Jumlah anggaran 2016 lebih besar dari tahun 2015 hal ini dikarenakan kenaikan anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepada masyarakat dan SKPD sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Data Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Bappeda Kabupaten

Purbalingga Tahun 2015-2016

Kelompok Belanja	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Belanja Tidak Langsung	2.589.219.123	95,66	2.747.144.202	95,08
Belanja Langsung	3.985.269.802	84,77	4.732.054.318	87,52
Jumlah	6.574.488.925	88,75	7.479.198.520	90,15

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2016, Sebagaimana telah disebutkan dalam pencapaian target kinerja APBD Bab II, bahwa Bappeda Kabupaten Purbalingga hanya melaksanakan kebijakan bidang belanja daerah tahun 2016 dengan jumlah dana yang dialokasikan sesuai APBD tahun 2016



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

sebesar Rp 8.653.649.000,00 realisasinya Rp 7.479.198.520,00 atau 86,43 persen terdiri 42 kegiatan.

Secara keseluruhan kinerja keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2015 dan tidak mengalami hambatan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual paling lambat pada tahun 2015. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah



atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pengukuran Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- 2) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 3) Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.
- 4) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
 - d) Persediaan hewan dan tanamanyang dikembangbiakkan dinilaidengan menggunakan nilai wajar; dan



- e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Aset Tetap

A. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari **Rp 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah); dan
- c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

B. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

- a) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- b) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- d) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
 - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/distribusikan dengan aset:
 - i. Biaya persiapan tempat;
 - ii. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - iii. Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - v. Biaya konstruksi; dan
 - vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.



c. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

g) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran yang dikaitlisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- c. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
- d. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah masa manfaat, dan/atau
 - bertambah kapasitas, dan/atau
 - bertambah kualitas, dan/atau
 - bertambah volume.
 - ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

h) Penyajian Aset Tetap



- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

- b. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{(\text{Nilai yang dapat disusutkan})}{(\text{Masa manfaat})}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

- c. Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.
- d. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- e. Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam penggeraan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

3) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

- b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- i. Tagihan Penjualan Angsuran;
- ii. Tuntutan Ganti Rugi;
- iii. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- iv. Aset Tak Berwujud; dan
- v. Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke



dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempaan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

4) Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek

adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5) Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal



laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

6) Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
 - d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - f. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

7) Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.



- c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

8) Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a.Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b.Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c.Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9) Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



4. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan daerah SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan LRA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja _____ Rp. 7.479.198.520,-

Bappeda Kabupaten Purbalingga hanya melaksanakan kebijakan bidang belanja daerah tahun 2016 dengan jumlah dana yang dialokasikan sebelum perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 7.996.881.000,- terdiri 37 kegiatan, adapun jumlah anggaran setelah perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,- terdiri 43 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 7.479.198.520,- atau 90,15 %. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 7.051.686.520,- (86,06%) dan Belanja Modal sebesar Rp 427.512.000,- (92,93%).

Jika dibanding dengan realisasi tahun 2015 terdapat kenaikan dengan rincian sebagai berikut :

Data Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016

	2016		2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	8.193.599.000	7.051.686.520	6.166.576.425
Belanja Modal	460.050.000	427.512.000	407.912.500
Jumlah	8.653.649.000	7.479.198.520	6.574.488.925

Belanja SKPD BAPPEDA Menurut Kelompok Belanja

Penyajian dan Pengungkapan belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung sehingga belanja SKPD Bappeda dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

	2016		2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Langsung	2.889.263.000	2.747.144.202	2.589.219.123
Belanja Langsung	5.764.386.000	4.732.054.318	3.985.269.802
Jumlah	8.653.649.000	7.479.198.520	6.574.488.925

Realisasi Belanja Langsung tahun 2016 mencapai Rp.4.732.054.000,- atau 82,09 % sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 2.747.144.202,- atau 95,08% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016.

Realisasi Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp 746.784.516,- atau naik 18,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp 157.925.079 atau sebesar 6,09 % dari realisasi tahun 2015 sebesar 88,75%.

1. Belanja Operasi _____ Rp. 7.051.686.520,-

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.051.686.520,- atau 86,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp 8.193.599.000,-. Belanja Operasi tersebut merupakan 94,68% dari total Bappeda tahun 2016 sebesar Rp. 8.653.649.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 885.110.095,- atau naik 14,35%. Kenaikan tersebut terdapat pada kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa masing-masing sebesar Rp 92.660.574,- dan Rp 330.338.391,- sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

	2016		2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	4.193.334.000,00	3.715.844.202,00	3.343.094.123,00
Belanja Barang dan Jasa	4.000.265.000,00	3.335.842.318,00	2.823.482.302,00
Jumlah	8.193.599.000,00	7.051.686.520,00	6.166.576.425,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Bappeda tahun 2016 sebesar Rp 3.715.844.202,- atau 88,61% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016 sebesar Rp



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

4.193.334.000,-. Jumlah Belanja Pegawai tersebut merupakan 48,46% dari total Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana data di bawah ini :

Belanja Pegawai	2016		2015
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.219.063.000,00	2.173.344.202,00	2.164.419.123,00
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.661.247.000,00	1.653.176.995,00	1.596.501.603,00
Belanja Tunjangan Keluarga	170.273.000,00	156.845.977,00	164.715.932,00
Belanja Tunjangan Jabatan	173.250.000,00	160.295.000,00	171.100.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	48.884.000,00	44.255.000,00	47.260.000,00
Belanja Tunjangan Beras	95.526.000,00	94.218.420,00	102.181.220,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.071.000,00	9.947.432,00	29.915.241,00
Belanja Pembulatan Gaji	28.000,00	24.449,00	27.871,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	47.095.000,00	46.918.222,00	48.746.544,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	4.272.000,00	4.257.066,00	2.205.951,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.417.000,00	3.405.641,00	1.764.761,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	670.200.000,00	573.800.000,00	424.800.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	670.200.000,00	573.800.000,00	424.800.000,00
Belanja Uang Lembur	22.046.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Lembur PNS	20.850.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	1.196.000,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	1.164.925.000,00	851.600.000,00	702.275.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.094.875.000,00	790.200.000,00	641.495.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	65.550.000,00	56.900.000,00	57.780.000,00
Honorarium Non PNS	117.100.000,00	117.100.000,00	51.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.600.000,00	33.600.000,00	32.400.000,00
Upah Harian	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
Upah bulanan	69.300.000,00	69.300.000,00	19.200.000,00
JUMLAH	4.193.334.000,00	3.715.844.202,00	3.343.094.123,00

b. Belanja Barang dan Jasa **Rp 3.335.842.318,-**

Realisasi Belanja Barang / Jasa sebesar Rp 3.335.842.318,- atau 83,39% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016 sebesar Rp 4.000.265.000,-. Jumlah Belanja Barang / Jasa tersebut merupakan 44,60% dari total realisasi Belanja Bappeda tahun 2016.

Rincian Belanja Barang / Jasa tahun 2016 sebagai berikut :

URAIAN	2016		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa	4.000.265.000,00	3.335.842.318,00	83,39%
Belanja Bahan Pakai Habis	256.844.000,00	238.327.759,00	92,79%
Belanja Alat Tulis Kantor	198.208.000,00	181.204.500,00	91,42%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.865.000,00	5.761.500,00	98,24%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.714.000,00	6.249.000,00	93,07%
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.757.000,00	42.159.450,00	98,60%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.496.309,00	99,75%
Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.457.000,00	80,94%
Belanja Bahan/Material	5.115.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.640.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan obat-obatan	225.000,00	0,00	0,00%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Belanja Penghargaan	2.250.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan Laboratorium	0,00	0,00	0,00%
Belanja Jasa Kantor	797.680.000,00	699.014.409,00	87,63%
Belanja Telepon	9.000.000,00	7.188.551,00	79,87%
Belanja Air	3.000.000,00	2.503.740,00	83,46%
Belanja Listrik	51.000.000,00	45.611.844,00	89,43%
Belanja Surat Kabar/Majalah	7.860.000,00	7.550.000,00	96,06%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.020.000,00	28.625.484,00	92,28%
Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	166.290,00	11,09%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	618.000.000,00	564.892.000,00	91,41%
Belanja Jasa Publikasi	28.200.000,00	22.994.000,00	81,54%
Belanja Jasa Akomodasi	36.500.000,00	10.885.000,00	29,82%
Belanja Jasa Dekorasi	6.600.000,00	5.597.500,00	84,81%
Belanja Jasa Hiburan / Rias	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	296.420.000,00	237.005.125,00	79,96%
Belanja Jasa Service	24.980.000,00	22.409.000,00	89,71%
Belanja Penggantian Suku Cadang	63.080.000,00	62.370.000,00	98,87%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	201.760.000,00	145.685.500,00	72,21%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.600.000,00	6.540.625,00	99,10%
Belanja Cetak dan Penggandaan	308.699.000,00	259.679.750,00	84,12%
Belanja Cetak	151.504.000,00	126.540.000,00	83,52%
Belanja Penggandaan	157.195.000,00	133.139.750,00	84,70%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.300.000,00	51.554.175,00	78,95%
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	65.300.000,00	51.554.175,00	78,95%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.690.000,00	7.990.000,00	32,36%
Belanja Sewa Meja Kursi	3.690.000,00	3.490.000,00	94,58%
Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	2.500.000,00	45,45%
Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%
Belanja Sewa Panggung	7.500.000,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Peralatan Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman	356.135.000,00	286.005.700,00	80,31%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	341.260.000,00	274.790.000,00	80,52%
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.875.000,00	11.215.700,00	75,40%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.800.000,00	13.500.000,00	97,83%
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.800.000,00	13.500.000,00	97,83%
Belanja Pakaian Kerja	10.100.000,00	0,00	0,00%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.100.000,00	0,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas	1.426.600.000,00	1.161.654.973,00	81,43%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.525.000,00	225.370.000,00	60,82%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.056.075.000,00	936.284.973,00	88,66%
Belanja Pemeliharaan	40.092.000,00	37.754.500,00	94,17%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.367.000,00	21.049.500,00	94,11%
Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	600.000,00	250.000,00	41,67%
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.625.000,00	15.620.000,00	99,97%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00%
Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	835.000,00	55,67%
Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.836.000,00	99,64%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	44.836.000,00	99,64%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	16.194.927,00	80,97%
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	20.000.000,00	16.194.927,00	80,97%
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	311.415.000,00	265.575.000,00	85,28%
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	311.415.000,00	265.575.000,00	85,28%
Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.375.000,00	10.750.000,00	65,65%
Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	16.375.000,00	10.750.000,00	65,65%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Realisasi belanja untuk kelompok belanja barang dan jasa, belanja bahan pakai habis, belanja sewa sarana mobilitas, belanja pakaian dinas dan atributnya, Belanja Pemeliharaan dan belanja Jasa Konsultasi masing-masing realisasinya 100 % atau di atas realisasi rata-rata untuk belanja barang dan jasa 83,39 %, sedangkan kelompok belanja barang dan jasa yang persentasenya terendah di bawah rata-rata belanja barang dan jasa adalah belanja Bahan / Material. Realisasi belanja Bahan / Material Rp 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp 5.115.000,-

Realisasi dari kelompok belanja Bahan / Material yang persentasenya rendah adalah belanja Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan Obat-obatan dan belanja Penghargaan yang realisasinya Rp 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp 5.115.000,- karena kelompok belanja tersebut terdapat di dalam Kegiatan Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau yang tidak terlaksana karena Tahun 2016 tidak ada kegiatan dari pusat yang dapat dilaksanakan oleh Pegiat Lingkungan.

2.

Belanja Modal Rp 427.512.000,- B

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 427.512.000,- atau 92,93 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp 460.050.000,-. Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 5,72% dari total belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun dari anggaran 2015 sebesar Rp 407.912.500,- angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 19.599.500,- atau naik 4,80 %.

Belanja modal tahun 2016 terdiri dari kelompok belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja peralatan dan mesin Rp 375.112.000,- atau 92,03 % dari anggaran sebesar Rp 407.600.000,- sedangkan belanja modal **gedung dan Bangunan** realisasinya Rp. 52.400.000,- atau 99,90% dari anggaran Rp 52.450.000,-.

Realisasi anggaran belanja modal tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah :

	2016		2015
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
BM Tanah	-	-	-
BM Peralatan dan Mesin	407.600.000,00	375.112.000,00	407.912.500,00
BM Gedung dan Bangunan	52.450.000,00	52.400.000,00	50.000,00
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
BM Aset tetap lainnya	-	-	-
Jumlah	460.050.000,00	427.512.000,00	4 07.962.500,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin _____ Rp 375.112.000,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 375.112.000,- atau 92,03% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016 sebesar Rp 407.600.000,- rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebagai berikut:

BELANJA MODAL	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.600.000,00	375.112.000,00	92,03
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	277.500.000,00	274.710.000,00	98,99
- Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	82.500.000,00	79.710.000,00	96,62
- Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
- Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.500.000,00	24.000.000,00	94,12
- Pengadaan Meubelair	19.000.000,00	17.500.000,00	92,11
- Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
- Pengadaan Komputer	76.900.000,00	63.702.000,00	82,84
- Pengadaan Personal Komputer	68.000.000,00	58.730.000,00	86,37
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	4.972.000,00	62,15
- Pengadaan Peralatan Jaringan	900.000,00	0,00	-
- Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	0,00	-
- Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	0,00	-
- Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Umum	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ Rp 52.400.000,-

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 52.400.000 atau 99,90 % dari anggaran sebesar Rp 52.450.000,-. Kelompok belanja Gedung dan Bangunan adalah belanja modal pembangunan garasi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan Umum Atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerapkan penyajian kembali (restatement) terhadap Laporan Operasional tahun 2016 sehingga dalam penjelasan di bawah ini,



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

menyajikan perbandingan antara Laporan Operasional tahun 2016 dengan Laporan Operasional tahun 2015.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan beban.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Pendapatan-LO Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar 0 % karena tidak mengelola pendapatan.

Beban. Realisasi Beban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar Rp 7.413.915.473,50 Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 3.725.075.443,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 3.335.047.943,-, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 353.792.087,50.

Dari realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, maka pada tahun 2016, terdapat defisit sebesar Rp 7.413.915.473,50.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana berikut:

5.2.1

P

ENDAPATAN - LO **Rp 0,-**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak mengelola pendapatan, sehingga realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 0,-

5.2.2

B

EBAN **Rp 7.413.915.473,50**

Beban tahun 2016 sebesar Rp 7.413.915.473,50 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 3.725.075.443,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 3.335.047.943,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2016 sebesar Rp 353.792.087,50. Beban dalam laporan operasional tahun 2016 sebagaimana daftar di bawah ini :

Uraian	Saldo 2016	Saldo 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN OPERASIONAL	7.413.915.473,50	6.492.874.473,50	921.041.000,00	14,19
Beban Pegawai-LO	3.725.075.443,00	3.333.220.824,00	391.854.619,00	11,76
Beban Barang dan Jasa	3.335.047.943,00	2.823.729.562,00	511.318.381,00	18,11
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Beban Penyusutan dan Amortasi	353.792.087,50	335.924.087,50	17.868.000,00	5,32
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Surplus/(Defisit)umlah	(7.413.915.473,50)	(6.492.874.473,5)	(921.041.000,0)	14,19

1. Beban Pegawai _____ Rp Rp 3.725.075.443,-

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Data Beban Pegawai Bappeda Tahun 2016 dan 2015

Belanja Pegawai	BEBAN		Kenaikan / Penurunan	
	2016	2015	Rp.	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.173.344.202,00	2.164.419.123,00	8.925.079,00	0,41
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.653.176.995,00	1.596.501.603,00	56.675.392,00	3,55
Belanja Tunjangan Keluarga	156.845.977,00	164.715.932,00	(7.869.955,00)	(4,78)
Belanja Tunjangan Jabatan	160.295.000,00	171.100.000,00	(10.805.000,00)	(6,32)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	44.255.000,00	47.260.000,00	(3.005.000,00)	(6,36)
Belanja Tunjangan Beras	94.218.420,00	102.181.220,00	(7.962.800,00)	(7,79)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.947.432,00	29.915.241,00	(19.967.809,00)	(66,75)
Belanja Pembulatan Gaji	24.449,00	27.871,00	(3.422,00)	(12,28)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	46.918.222,00	48.746.544,00	(1.828.322,00)	(3,75)
Belanja Iuran Jaminan Kematian	4.257.066,00	2.205.951,00	2.051.115,00	92,98
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.405.641,00	1.764.761,00	1.640.880,00	92,98
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	573.800.000,00	424.800.000,00	149.000.000,00	35,08
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	573.800.000,00	424.800.000,00	149.000.000,00	35,08
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00	
Belanja Uang Lembur PNS	0	0	0,00	
Belanja Uang Lembur Non PNS	0	0	0,00	
Honorarium PNS	851.600.000,00	702.275.000,00	149.325.000,00	21,26
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	790.200.000,00	641.495.000,00	148.705.000,00	23,18
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	56.900.000,00	57.780.000,00	(880.000,00)	(1,52)
Honorarium Non PNS	117.100.000,00	51.600.000,00	65.500.000,00	126,94
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.600.000,00	32.400.000,00	1.200.000,00	3,70
Upah Harian	14.200.000,00	0	14.200.000,00	#DIV/0!
Upah bulanan	69.300.000,00	19.200.000,00	50.100.000,00	260,94
JUMLAH	3.715.844.202,00	3.343.094.123,00	372.750.079,00	11,15



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Jumlah Beban Pegawai tahun 2016 sebesar Rp 3.725.075.443,- terdiri dari Realisasi belanja pegawai tahun 2016 Rp 3.715.844.202,- dikurangi dengan utang belanja pegawai tahun 2015 (kekurangan gaji bulan Oktober s.d Desember 2015) sebesar Rp. 2.296.333,- ditambah dengan utang belanja pegawai tahun 2016 (kekurangan gaji bulan Pebruari s.d Desember 2016 yang belum dibayar) sebesar Rp 11.527.574,- ,

a. Utang Belanja Pegawai 2016

Daftar beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016

Nama	Jenis Beban	Tgl Pembayaran	Masa Beban	Nilai
BEBAN PEGAWAI	Beban Pegawai (Kekurangan Gaji)	-	Pebruari s/d Desember 2016	11.527.574,-
Jumlah				11.527.574,-

b. Utang Belanja Pegawai 2015

Daftar beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016

Nama	Jenis Beban	Tgl Pembayaran	Masa Beban	Nilai
BEBAN PEGAWAI	Beban Pegawai			
Rapelan Gaji	Kekurangan Gaji	25-07-2016	Okt s.d Des 2015	2.296.333
Jumlah				2.296.333

Beban Pegawai BAPPEDA Tahun 2016

	Belanja Pegawai	Penyesuaian	Beban Pegawai
LRA 2016	3.715.844.202,00		
Utang Belanja Pegawai 2015		2.296.333,00	
Utang Belanja Pegawai 2016		11.527.574,00	
Jumlah			3.725.075.443,00

2. Beban Barang dan Jasa _____ Rp 3.336.168.693,-

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban barang dan jasa dihitung dari belanja barang dan jasa 2016 dikurangi persediaan 2016 ditambah persediaan tahun 2015 ditambah utang belanja barang jasa tahun 2016.

BELANJA BARANG DAN JASA BAPPEDA TAHUN 2016

URAIAN	2016		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan Pakai Habis	256.844.000,00	238.327.759,00	92,79%
Belanja Alat Tulis Kantor	198.208.000,00	181.204.500,00	91,42%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.865.000,00	5.761.500,00	98,24%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.714.000,00	6.249.000,00	93,07%
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.757.000,00	42.159.450,00	98,60%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.496.309,00	99,75%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.457.000,00	80,94%
Belanja Bahan/Material	5.115.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.640.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan obat-obatan	225.000,00	0,00	0,00%
Belanja Penghargaan	2.250.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bahan Laboratorium	0,00	0,00	0,00%
Belanja Jasa Kantor	797.680.000,00	699.014.409,00	87,63%
Belanja Telepon	9.000.000,00	7.188.551,00	79,87%
Belanja Air	3.000.000,00	2.503.740,00	83,46%
Belanja Listrik	51.000.000,00	45.611.844,00	89,43%
Belanja Surat Kabar/Majalah	7.860.000,00	7.550.000,00	96,06%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.020.000,00	28.625.484,00	92,28%
Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	166.290,00	11,09%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	618.000.000,00	564.892.000,00	91,41%
Belanja Jasa Publikasi	28.200.000,00	22.994.000,00	81,54%
Belanja Jasa Akomodasi	36.500.000,00	10.885.000,00	29,82%
Belanja Jasa Dekorasi	6.600.000,00	5.597.500,00	84,81%
Belanja Jasa Hiburan / Rias	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	296.420.000,00	237.005.125,00	79,96%
Belanja Jasa Service	24.980.000,00	22.409.000,00	89,71%
Belanja Penggantian Suku Cadang	63.080.000,00	62.370.000,00	98,87%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	201.760.000,00	145.685.500,00	72,21%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.600.000,00	6.540.625,00	99,10%
Belanja Cetak dan Penggandaan	308.699.000,00	259.679.750,00	84,12%
Belanja Cetak	151.504.000,00	126.540.000,00	83,52%
Belanja Penggandaan	157.195.000,00	133.139.750,00	84,70%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.300.000,00	51.554.175,00	78,95%
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	65.300.000,00	51.554.175,00	78,95%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.690.000,00	7.990.000,00	32,36%
Belanja Sewa Meja Kursi	3.690.000,00	3.490.000,00	94,58%
Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	2.500.000,00	45,45%
Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%
Belanja Sewa Panggung	7.500.000,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Peralatan Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman	356.135.000,00	286.005.700,00	80,31%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	341.260.000,00	274.790.000,00	80,52%
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.875.000,00	11.215.700,00	75,40%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.800.000,00	13.500.000,00	97,83%
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.800.000,00	13.500.000,00	97,83%
Belanja Pakaian Kerja	10.100.000,00	0,00	0,00%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.100.000,00	0,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas	1.426.600.000,00	1.161.654.973,00	81,43%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.525.000,00	225.370.000,00	60,82%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.056.075.000,00	936.284.973,00	88,66%
Belanja Pemeliharaan	40.092.000,00	37.754.500,00	94,17%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.367.000,00	21.049.500,00	94,11%
Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	600.000,00	250.000,00	41,67%
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.625.000,00	15.620.000,00	99,97%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00%
Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.500.000,00	835.000,00	55,67%
Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	44.836.000,00	99,64%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	44.836.000,00	99,64%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	16.194.927,00	80,97%
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	20.000.000,00	16.194.927,00	80,97%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	311.415.000,00	265.575.000,00	85,28%
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	311.415.000,00	265.575.000,00	85,28%
Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.375.000,00	10.750.000,00	65,65%
JUMLAH	4.000.265.000,00	3.335.842.318,00	83,39%

Beban barang dan jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 sebesar Rp 3.335.047.943,- terdiri dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2016 sebesar Rp 3.335.842.318,- dikurangi persediaan tahun 2016 Rp 3.557.725,- ditambah persediaan tahun 2015 Rp 2.399.100,- dan utang belanja dan jasa tahun 2016 Rp 1.849.250,-. Serta utang internet bulan Nopember dan Desember tahun 2015 sebesar Rp. 1.485.000,- Beban barang dan jasa atas realisasi barang dan jasa 2016 sebesar Rp. 3.336.168.693 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut :

Jenis Beban	PERSEDIAAN		
	2016	2015	Berlebih/ (berkurang)
PERSEDIAAN	3.557.725	2.399.100	1.218.625
Persediaan ATK	1.668.725	1.312.100	356.625
Persediaan alat listrik	210.000	160.000	50.000
Persediaan bahan material	-	495.000	(495.000)
Persediaan benda pos	858.000	432.000	426.000
Peralatan Kebersihan & Bahan	821.000	-	821.000
Pembersih			
Jumlah	3.557.725	2.399.100	1.218.625

b. Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2016

Daftar beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016

Nama	Jenis Beban	Tgl Pembayaran	Masa Beban	Nilai
Beban Barang dan Jasa				
Perawatan Kendaraan bermotor	STNK	27 Jan 2017	Okt - Des 2016	1.849.000
Jumlah				1.849.000

c. Utang Internet tahun 2015 sebesar Rp. 1.485.000,-

BEBAN BARANG DAN JASA BAPPEDA TAHUN 2016

URAIAN	PENYESUAIAN	JUMLAH BEBAN
Belanja Br & Jasa 2016	3.335.842.318	
Persediaan tahun 2016		3.557.725
Persediaan tahun 2015	2.399.100	
Utang Belanja Br, & Jasa (Utang Internet)	1.485.000	
Beban Barang dan Jasa	3.335.842.318	3.884.100
		3.557.725
		3.336.168.693

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi _____ Rp 353.792.087,50



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2016 sebesar Rp 353.792.087,50 yang terdiri dari :

URAIAN	2016
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	325.137.637,50
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	24.337.500,00
Beban Penyusutan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	155.270.687,50
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	127.442.750,00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	17.749.200,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	337.500,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.425.800,00
Beban Penyusutan Gedung Tempat Kerja	27.425.800,00
Beban Penyusutan Gedung Tempat Tinggal	-
Beban Penyusutan Bangunan Menara	-
Dst	
Beban Penyusutan Instalasi, Jaringan dan Irigasi	1.228.650,00
Beban Penyusutan Instalasi	875.000,00
Beban Penyusutan Jaringan	353.650,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	-
Dst	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
Dst	
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	-
TOTAL BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	353.792.087,50

5.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL _____ Rp 0,-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tidak mengelola kegiatan non operasional sehingga realisasinya sebesar Rp 0,-

5.2.4 POS LUAR BIASA _____ Rp 0,-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tidak mengelola kegiatan pos luar biasa sehingga realisasinya sebesar Rp 0,-

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A.

Ekuitas Awal _____ Rp 2.566.286.842,-
Ekuitas awal tahun 2016 berasal dari saldo ekuitas tahun 2015 sebesar Rp 2.566.286.842,-

B.

Surplus / Defisit-LO _____ Rp (7.413.915.473,50)

S



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Surplus/defisit-LO berasal dari Pendapatan LO tahun 2016 sebesar Rp 0,00 dikurangi beban tahun 2016 sebesar RP. 7.413.915.473,50

C.

K

Koreksi Mutasi Aset Tetap _____ Rp 125.540.000,-

Koreksi ekuitas lainnya merupakan salah satu dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap aset tetap. Koreksi ekuitas lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar Rp 125.540.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Daftar koreksi Mutasi Aset Tetap tahun 2016

URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Kendaraan bermotor perorangan	550.000,00		(550.000,00)
Kendaraan bermotor perorangan		5.900.000,00	5.350.000,00
Alat kantor lainnya (Alat Penghancur Kertas)	4.680.000,00		670.000,00
Alat kantor lainnya (Alat Penghancur Kertas)		9.700.000,00	10.370.000,00
alat pendingin / AC Split	3.920.000,00		6.450.000,00
alat pendingin / AC Split		22.900.000,00	29.350.000,00
komputer unit jaringan		600.000,00	29.950.000,00
Personal komputer	7.225.000,00		22.725.000,00
Personal komputer		38.900.000,00	61.625.000,00
Peralatan mini komputer	2.350.000,00		59.275.000,00
Peralatan mini komputer		16.000.000,00	75.275.000,00
Peralatan studio visual	4.180.000,00		71.095.000,00
Peralatan studio visual		40.450.000,00	111.545.000,00
Peralatan studio video dan film		3.995.000,00	115.540.000,00
Peralatan pemetaan ukur		10.000.000,00	125.540.000,00
Jumlah	22.905.000,00	148.445.000,00	125.540.000,00

D. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN _____ Rp. 7.479.198.520,-

Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2016 sebesar Rp. 7.479.198.520,- merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan R/K PPKD

E.

E

Ekuitas Akhir _____ Rp 2.757.109.938,50,-

Ekuitas akhir atau ekuitas dihitung atas dasar ekuitas awal dan koreksi ekuitas lainnya dengan surplus atau defisit-LO dan kewajiban yang dikonsolidasikan. Koreksi ekuitas lainnya merupakan salah satu dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap aset tetap. Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar Rp 2.757.109.938,50 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

URAIAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	2.566.286.842,00	2.249.215.515,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.413.915.473,50)	(6.492.874.473,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		
Koreksi nilai persediaan	-	-
Koreksi Mutasi Aset tetap	125.540.000,00	
Koreksi kesalahan Pencatatan Beban	50,00	-
Koreksi ekuitas lainnya	-	235.456.875,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.479.198.520,00	6.574.488.925,00
EKUITAS AKHIR	2.757.109.938,50	2.566.286.842,00

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

5.4.1 Posisi Keuangan Secara Umum

Secara ringkas, posisi neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

URAIAN	2016	2015	Kenaikan/penurunan	
			Rp	%
Aset Lancar	3.557.725,00	2.399.100,00	1.158.625,00	48,29
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	2.172.434.337,50	2.121.619.425,00	50.814.912,50	2,40
Aset Lainnya	594.494.650,00	446.049.650,00	148.445.000,00	33,28
Jumlah Aset	2.770.486.712,50	2.570.068.175,00	200.418.537,50	7,80
Kewajiban Jangka Pendek	13.376.774,00	3.781.333,00	9.595.441,00	253,76
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	13.376.774,00	3.781.333,00	9.595.441,00	253,76
Jumlah Ekuitas	2.757.109.938,50	2.566.286.842,00	190.823.096,50	7,44
Jmlh Kewajiban dan Ekuitas	2.770.486.712,50	2.570.068.175,00	200.418.537,50	7,80

Dalam data tersebut di atas posisi neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan terlihat dari posisi aset dan ekuitas yang semakin besar. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Purbalingga terus berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan publik melalui penambahan kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi. Terhitung setelah dikurangi akumulasi penyusutan jumlah neraca tahun 2016 sebesar Rp 2.770.468.712,50 terdapat kenaikan sebesar Rp 200.418.537,50 atau 7,80 % dibanding tahun 2015 setelah penyusutan dengan jumlah Rp 2.570.068.175,50.

Penjelasan rinci per masing-masing pos Neraca adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

5.4.2 Penjelasan Atas Pos-PoS Neraca

5.4.2.1 Aset _____ Rp 2.770.468.712,50

Posisi Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2016 setelah akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp 2.770.468.712,50 atau meningkat Rp 200.418.537,50 atau 7,79 % dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.570.068.175. Nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya setelah dihitung dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/penurunan	
			Rp	%
Aset Lancar	3.557.725,00	2.399.100,00	1.158.625,00	48,29
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	2.172.434.337,50	2.121.619.425,00	50.814.912,50	2,40
Aset Lainnya	594.494.650,00	446.049.650,00	148.445.000,00	33,28
Akumulasi Penyusutan	(2.189.616.662,50)	(2.037.864.575,00)	(151.752.087,50)	7,45
Jumlah Aset	2.770.486.712,50	2.570.068.175,00	200.418.537,50	7,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan terjadi pada jenis aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, dengan peningkatan persentase terbesar pada aset lancar yang mengalami kenaikan 48,29 % atau meningkat sebesar Rp 1.158.625,-.

1. Aset Lancar _____ Rp 3.557.725,-

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.557.725,- mengalami peningkatan Rp 1.158.625,- atau 48,29 % dari saldo aset lancar per 31 Desember 2015. Jumlah Aset Lancar tersebut terdiri dari :

URAIAN	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/penurunan	
			Rp	%
Kas	-	-	-	-
Piutang	-	-	-	-
Persediaan	3.557.725	2.399.100	1.158.625	48,29
Jumlah Aset	3.557.725	2.399.100	1.158.625	48,29

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kas dan Piutang nihil, sedangkan persediaan mengalami kenaikan Rp 1.158.625,- atau 48,29% dari Rp 2.399.100,- pada tahun 2015.

a.

as _____ Rp Nihil

K

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0.- (nihil) atau sama dengan Kas per 31 Desember 2015.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak mengelola pendapatan.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

P

b.

piutang _____ Rp Nihil

Saldo Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0 (nihil) atau sama dengan saldo Piutang per 31 Desember 2015 baik piutang pajak, piutang dana perimbangan, piutang retribusi, piutang lainnya, piutang jasa pelayanan BLUD maupun penyisihan piutang tak tertagih.

P

c.

persediaan _____ Rp 3.557.725,-

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.557.725,- mengalami kenaikan sebesar Rp 1.158.625,- atau naik 48,29% dari saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.399.100,-, yang terdiri dari :

URAIAN	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/penurunan	
			Rp	%
Persediaan Alat Tulis kantor	1.668.725	1.312.100	356.625	78,63
Persediaan Alat-alat Listrik	210.000	160.000	50.000	76,19
Persediaan Bahan Material	-	495.000	(495.000)	-
Persediaan Benda pos	858.000	432.000	426.000	50,35
Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	821.000	-	821.000	-
Jumlah Aset	3.557.725	2.399.100	1.158.625	67,43

Saldo Persediaan terbesar berupa alat tulis kantor yaitu Rp 1.668.725,- mengalami kenaikan Rp 356.625,- atau 78,63 % dibanding persediaan per 31 Desember 2015 semula 1.312.100,-. Secara lengkap, rincian Persediaan berdasarkan jenis dapat dilihat pada lampiran berita acara pemeriksaan inventarisasi fisik/stock opname.

2. Investasi Jangka Panjang _____ Rp Nihil

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp nihil baik nilai investasi permanen, investasi non permanen, investasi pada lembaga keuangan maupun investasi yang dikelola SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Aset Tetap _____ Rp 2.172.434.337,50

Nilai Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 Rp



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

2.172.434.337,50- terdapat kenaikan sebesar Rp 50.814.912,50 atau 2,40%. Dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.121.619.425,-.

Nilai aset awal tahun 2016 Rp 4.159.484.000,- terdapat mutasi tambah sebesar Rp 202.567.000,- sehingga menjadi Rp 4.362.051.500,- sementara akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar Rp 2.189.616.662,50,- sehingga posisi aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.172.434.337,50.

Demikian pula untuk aset tetap tahun 2015 semula Rp 4.159.484.000,00, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.037.864.575,00 sehingga posisi per 31 Desember 2015 menjadi Rp 2.121.619.425,00 hal dapat dilihat pada data sebagai berikut:

	31-Des-16	Mutasi Bersih	31-Des-15
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.940.438.000,00	150.167.000,00	2.790.271.000,00
Gedung dan Bangunan	1.371.290.000,00	52.400.000,00	1.318.890.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.146.000,00	-	49.146.000,00
Aset tetap lainnya	1.177.000,00	-	1.177.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
Jumlah	4.362.051.000,00	202.567.000,00	4.159.484.000,00
Akumulasi Penyusutan	2.189.616.662,50		2.037.864.575,00
Aset Tetap akhir	2.172.434.337,50		2.121.619.425,00

Mutasi bersih aset tetap tahun 2016 senilai Rp 202.567.000,- yang terdiri dari penambahan senilai Rp 427.512.000,- dan pengurangan senilai sebesar Rp 224.945.000,-

Penambahan aset tetap sebesar Rp 427.512.000,- tersebut terjadi karena penambahan belanja modal tahun 2016 sebesar Rp 427.512.000,- Sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp 224.945.000,- terjadi karena mutasi ke SKPD (DPPKAD) sebesar Rp 76.500.000,- reklas ke aset lain (reklas keluar) Rp 148.445.000,- Secara rinci, penjelasan atas mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tanah _____ Rp Nihil

Nilai saldo tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2016 sebesar Rp nihil termasuk posisi saldo per 31 Desember 2015 Rp nihil, karena administrasi dan hal-hal yang berkenaan dengan nilai mutasi tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

b. Peralatan dan Mesin _____ Rp 2.940.438.000,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.940.438.000,00,- terdapat kenaikan sebesar Rp 150.167.000,- atau 5,38 % dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.790.271.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Alat-alat Berat	194.700.000,00	194.700.000,00	-	0,00
Alat-alat Angkutan	1.595.630.500,00	1.403.320.500,00	192.310.000,00	13,70
Alat-alat Bengkel	-	-	-	0,00
Alat-alat Pertanian	-	-	-	0,00
Alat Kantor & rumah tangga	1.041.041.500,00	1.031.439.500,00	9.602.000,00	0,93
Alat studio dan Komunikasi	106.366.000,00	160.811.000,00	(54.445.000,00)	(33,86)
Alat-alat Kedokteran	-	-	-	0,00
Alat-alat Laboratorium	2.700.000,00	-	2.700.000,00	
Jumlah	2.940.438.000,00	2.790.271.000,00	150.167.000,00	5,38

Mutasi bersih sebesar Rp 150.167.000,- tersebut berasal dari penambahan peralatan dan mesin senilai Rp 570.712.000,- dan pengurangan peralatan dan mesin senilai Rp 420.545.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih
Alat-alat Berat	194.700.000,00	194.700.000,00	-
Alat-alat Angkutan	274.710.000,00	82.400.000,00	192.310.000,00
Alat-alat Bengkel	-	-	-
Alat-alat Pertanian	-	-	-
Alat Kantor & rumah tangga	97.702.000,00	88.100.000,00	9.602.000,00
Alat studio dan Komunikasi	-	54.445.000,00	(54.445.000,00)
Alat-alat Kedokteran	900.000,00	900.000,00	-
Alat-alat Laboratorium	2.700.000,00	-	2.700.000,00
Jumlah	570.712.000,00	420.545.000,00	150.167.000,00

Penambahan aset tetap tersebut terjadi karena:

- (1) Penambahan aset yang sebelumnya belum tercatat
- (2) Penerimaan aset dari donasi/hibah
- (3) Reklasifikasi aset yang berasal dari dari aset tetap lainnya
- (4) Koreksi pembukuan yang menambah asset tetap
- (5) Penambahan dari belanja modal.

Sedangkan penurunan aset tetap terjadi karena:

- (1) Koreksi atas pengelompokan aset tetap
- (2) Reklasifikasi aset tetap lainnya
- (3) Koreksi pembukuan yang mengurangi aset tetap lainnya.

c. Gedung dan Bangunan _____ Rp 1.371.290.000,-

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.371.290.000,- mengalami mutasi bertambah sebesar Rp.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

52.400.000,- dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.318.890.000,- sebagaimana data di bawah ini :

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Bangunan Gedung/	1.371.290.000,00	1.318.890.000,00	52.400.000,00	3,97
Jumlah	1.371.290.000,00	1.318.890.000,00	52.400.000,00	3,97

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp 49.146.000,-**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 49.146.000,- tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 49.146.000,- dengan rincian :

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan	
			Rp	%
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan air (Irigasi)	-	-	-	-
Instalasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
Jaringan	14.146.000,00	14.146.000,00	-	-
Jumlah	49.146.000,00	49.146.000,00	-	-

e. Aset Tetap Lainnya **Rp 1.177.000,-**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.177.000,- tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan	
			Rp	%
Buku dan Perpustakaan	877.000,00	877.000,00	-	-
Barang bercorak kesenian	300.000,00	300.000,00	-	-
Hewan/ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	1.177.000,00	1.177.000,00	-	-

f. Konstruksi Dalam Penggerjaan **Rp 0,-**

Saldo konstruksi dalam penggerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- hal ini sama dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,-.

4. Dana Cadangan **Rp 0,-**

Dana cadangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- hal ini sama dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,-.

5. Aset Lainnya **Rp 594.494.650,-**



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

Aset lainnya merupakan saldo aset yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga selain Aset Lancar dan Aset Tetap. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 594.494.650,- bertambah sebesar Rp 148.445.000,- atau 33,28 % dari jumlah aset lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 446.049.650,- Saldo aset lainnya tersebut terdiri dari:

	31-Des-15	31-Des-14	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	404.819.650,00	404.819.650,00	-	-
Aset Lain-lain	189.675.000,00	41.230.000,00	148.445.000,00	-
Jumlah	594.494.650,00	446.049.650,00	148.445.000,00	33,28

i. Aset Tidak Berwujud Rp 404.819.650,-

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 tidak mengalami mutasi baik penambahan maupun pengurangan atau sama dengan posisi per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 404.819.650,- Aset Tidak Berwujud tersebut berupa :

	31-Des-16	31-Des-15	selisih
Sistem Informasi Manajemen Jalan	50.565.000	50.565.000	-
SIM Perencanaan Pembangunan Daerah	145.462.400	145.462.400	-
Sistem Informasi Manajemen Irigasi	140.101.000	140.101.000	-
SIG Potensi Ekonomi Daerah	68.691.250	68.691.250	-
Jumlah	404.819.650	404.819.650	-

Software Sistem Informasi Manajemen Jalan berasal dari pengadaan tahun 2012 senilai Rp 50.565.000,- dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-16	31-Des-15	Selisih
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	675.000,00	675.000,00	-
Alat tulis kantor	162.000,00	162.000,00	-
Perangko,materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	-
Jasa pihak ketiga	49.060.000,00	49.060.000,00	-
Cetak	20.000,00	20.000,00	-
Pnggandaan	600.000,00	600.000,00	-
Jumlah	50.565.000,00	50.565.000,00	-

Software Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dari pengadaan tahun 2013 senilai Rp 145.462.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

	31-Des-16	31-Des-15	Selisih
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.160.000,00	2.160.000,00	-
Alat tulis kantor	464.500,00	464.500,00	-
Perangko,materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	-
Jasa pihak ketiga	103.550.000,00	103.550.000,00	-
Cetak	250.000,00	250.000,00	-
Penggandaan	680.400,00	680.400,00	-
Makanan dan minuman rapat	2.562.500,00	2.562.500,00	-
Perjalanan dinas luar daerah	6.255.000,00	6.255.000,00	-
Pengadaan komputer main frame/server	29.480.000,00	29.480.000,00	-
Jumlah	<u>145.462.400,00</u>	<u>145.462.400,00</u>	-

Software Sistem Informasi Manajemen Irigasi merupakan pengadaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Purbalingga tahun 2015 senilai Rp 140.101.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-16	31-Des-15	Selisih
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.860.000,00	1.860.000,00	-
Alat tulis kantor	1.335.000,00	1.335.000,00	-
Perangko,materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	-
Jasa pihak ketiga	135.245.000,00	135.245.000,00	-
Cetak	60.000,00	60.000,00	-
Penggandaan	675.000,00	675.000,00	-
Makanan dan minuman rapat	848.000,00	848.000,00	-
Jumlah	<u>140.101.000,00</u>	<u>140.101.000,00</u>	-

Software SIG Potensi Ekonomi Daerah merupakan pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 senilai Rp 68.691.250,00, dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-16	31-Des-15	Selisih
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-
Alat tulis kantor	1.795.250,00	1.795.250,00	-
Perangko,materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-
Jasa pihak ketiga	49.995.000,00	49.995.000,00	-
Penggandaan	1.567.500,00	1.567.500,00	-
Makanan dan minuman rapat	2.373.500,00	2.373.500,00	-
Perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	4.240.000,00	-
Perjalanan dinas luar daerah	3.890.000,00	3.890.000,00	-
Perlengkapan komputer/hardisk external	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	-
Jumlah	<u>68.691.250,00</u>	<u>68.691.250,00</u>	-

ii. Aset Lain-lain Rp 189.675.000,-

Aset Lain-lain tahun 2016 terdiri dari aset tetap dalam kondisi rusak berat maupun tidak ada fisiknya yang diajukan penghapusannya.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 189.675.000,- terdapat penambahan Rp. 148.445.000 atau 360,04% dari Rp 41.230.000,- posisi per 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Barang Rusak	189.675.000,00	41.230.000,00	148.445.000,00	360,04
Barang Tidak ada	-	-	-	-
Jumlah	189.675.000,00	41.230.000,00	148.445.000,00	-

6. Kewajiban Rp 13.376.774,-

Saldo kewajiban per 31 Desember 2016 Rp 13.376.774,- sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan Rp 3.781.333,- atau 253,76 % dari nilai posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.781.333,-

Sedangkan kewajiban jangka panjang SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga tidak memiliki kewajiban jangka panjang berupa utang dalam negeri maupun utang jangka panjang lainnya.

Kewajiban berasal dari utang belanja beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016 Sebesar Rp 13.376.774,- yaitu dari beban Belanja STNK Kendaraan bermotor bulan November dan Desember 2016 Rp 1.849.250,- dan beban pegawai berupa kekurangan gaji Februari s.d Desember 2016 sebesar Rp 11.527.574,-.

Daftar beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2016

Nama	Jenis Beban	Tgl Pembayaran	Masa Beban	Nilai
Beban Barang dan Jasa				
STNK	Beban Barang & Jasa	-	Nov - Des 2016	1.849.250
Beban Pegawai				
Rapelan gaji	Beban pegawai (kekurangan gaji)	-	Pebr - Des 2016	11.527.574
Jumlah				13.376.774

Kewajiban jangka pendek lainnya berupa berupa kewajiban untuk dikonsolidasikan berasal dari realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 7.479.198.520,-

7. Ekuitas Dana Rp 2.770.486.712,50

Ekuitas dana berasal dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan yang perhitungannya nilai jumlah aset dikurangi kewajiban. Nilai ekuitas dana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.770.486.712,50 bertambah Rp 200.418.537,- pada posisi per 31 Desember 2015. Ekuitas Dana per 31 Desember 2016 terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Dana Lancar	3.557.725,00	2.399.100,00	1.158.625,00	48,29
Ekuitas Dana Investasi	2.766.928.987,50	2.567.669.075,00	199.259.912,50	7,76
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-
Jumlah	2.770.486.712,50	2.570.068.175,00	200.418.537,50	7,80

Ekuitas dana lancar berasal dari nilai cadangan persediaan sebesar Rp 3.557.725,- sedangkan nilai ekuitas dana investasi berasal dari nilai aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp 2.766.928.987,- berupa nilai yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya masing-masing :

- Diinvestasikan dalam aset tetap Rp 2.172.434.337,50
- Diinvestasikan dalam aset lainnya Rp 594.494.650,-

8. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana _____ Rp 2.770.486.712,50

Nilai kewajiban dan ekuitas dana 31 Desember 2016 SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga merupakan nilai aset keseluruhan yang dimiliki berjumlah Rp 2.770.486.712,50 terdapat kenaikan sebesar Rp 200.418.537,50 atau 7,79 % dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.570.068.175,- .



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tidak memiliki informasi-informasi non keuangan, sehingga penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD adalah nihil.



BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2016.

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, maka informasi yang dapat diuraikan adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga hanya melaksanakan kebijakan bidang belanja daerah tahun 2016 dengan jumlah dana yang dialokasikan APBD tahun 2016 sebesar Rp 8.653.649.000,- realisasi sebesar Rp 7.479.198.520,- atau 86,43 %. Adapun Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.570.068.175,- terdapat kenaikan sebesar Rp 2.004.185.37,50 atau 7,79 % dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.570.068.175,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam kegiatan dan program-program APBD SKPD Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan laporan keuangan ini mudah-mudahan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun yang akan datang.

Purbalingga, 31 Desember 2016
Kepala Bappeda
Kabupaten Purbalingga



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650315 199103 1 013



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keruangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Neraca ;
3. Laporan Operasional ;
4. Laporan Perubahan Ekuitas ;
5. Catatan Atas laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadahi dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Purbalingga, 31 Desember 2016

Kepala Bappeda
Kabupaten Purbalingga

ttd

KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650315 199103 1 013